

SKRIPSI

**ANALISIS *FLYPAPER EFFECT* PADA PENGELOLAAN DANA
DESA KECAMATAN KULO KABUPATEN SIDENRENG
RAPPANG**



OLEH

SINTA DAHRI

NIM : 2020203862202053

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE**

2025

**ANALISIS *FLYPAPER EFFECT* PADA PENGELOLAAN DANA
DESA KECAMATAN KULO KABUPATEN SIDENRENG
RAPPANG**



Skripsi sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Akuntansi
(S.Akun) pada Program Studi Akuntansi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Institut Agama Islam Negeri Parepare

**OLEH:
SINTA DAHRI**

NIM : 2020203862202053

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PAREPARE**

2025

PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING

Judul Skripsi : Analisis *Flypaper Effect* Pada Pengelolaan
Dana Desa Kecamatan Kulo Kabupaten Sidenreng
Rappang

Nama Mahasiswa : Sinta Dahri

NIM : 2020203862202053

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Program Studi : Akuntansi Syari'ah

Dasar Penetapan Pembimbing : Surat Penetapan Pembimbing Skripsi
Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam
B.5161/In.39/FEBI.04/PP.00.9/08/2023

Disetujui Oleh

Pembimbing Utama : Dr. Zainal Said, M.H.

NIP : 19761118 200501 1 002

Pembimbing Pendamping : Dr. Andi Ayu Frihatni, S.E., M.Ak., CTA., ACPA.

NIDN : 2003029203

Mengetahui:

Dekan,

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

Dr. Muzdalifan Muhammadun, M.Agg
NIP 19710208 200112 2 002

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah swt. berkat hidayah, taufik dan maunah-Nya, penulis dapat menyelesaikan tulisan ini sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi dan memperoleh gelar Sarjana Akuntansi (S.Akun) pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare.

Penulis menghaturkan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada Ibunda Sukayati dan Ayahanda Dahri tercinta dimana dengan pembinaan dan berkah doa tulusnya, penulis mendapatkan kemudahan dalam menyelesaikan tugas akademik tepat pada waktunya.

Penulis telah menerima banyak bimbingan dan bantuan dari Bapak Dr. Zainal Said, M.H. selaku pembimbing I dan Ibu Dr. Andi Ayu Frihatni, S.E., M.Ak., ACPA., CTA selaku pembimbing II, atas segala bantuan dan bimbingan yang telah diberikan, penulis ucapkan terima kasih.

Selanjutnya, penulis juga menyampaikan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Hannani, M.Ag. sebagai Rektor IAIN Parepare yang telah bekerja keras mengelola pendidikan di IAIN Parepare.
2. Ibu Dr. Muzdalifah Muhammadun, M.Ag. sebagai Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam atas pengabdianya dalam menciptakan suasana pendidikan yang positif bagi mahasiswa.
3. Ibu Rini Purnamasari, S.E., M.Ak. sebagai Ketua Program Studi Akuntansi Syariah yang telah memberikan resolusi bagi mahasiswa terutama penulis yang merupakan anak Program Studinya.

4. Bapak Dr. Zainal Said, M.H. dan Ibu Dr. Andi Ayu Frihatni, S.E., M.Ak., ACPA., CTA selaku dosen pembimbing saya yang telah membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi dari awal sampai akhir.
5. Semua Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam yang telah meluangkan waktu mereka dalam mendidik penulis selama studi di IAIN Parepare.
6. Semua Staf atau Admin di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam dan di Rektorat IAIN Parepare yang telah membantu penulis dalam melakukan `penelitiannya.
7. Kedua orangtua saya serta keluarga besar saya sebagai Support System penulis yang telah memberikan bantuan baik moril maupun material hingga tulisan ini dapat diselesaikan.
8. Sepupu tercinta Nurul Fauzia sebagai Support System penulis yang memberikan dukungan dan dorongan hingga tulisan ini dapat diselesaikan.
9. Mohammad Iqmal sebagai Support System penulis yang memberikan dukungan dan dorongan hingga tulisan ini dapat diselesaikan. Terima kasih telah menjadi salah satu penyemangat, pendengar keluh kesah dalam penulisan skripsi, penasehat yang baik dan senantiasa memberikan dukungan.

Penulis tak lupa pula mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan, baik moril maupun material hingga tulisan ini dapat diselesaikan. Semoga Allah swt. berkenan menilai segala kebijakan sebagai amal jariyah dan memberikan rahmat dan pahala-Nya.

Akhirnya penulis menyampaikan kiranya pembaca berkenan memberikan saran konstruktif demi kesempurnaan skripsi ini.

Parepare, 1 Januari 2025

Penulis



Sinta Dahri



PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Mahasiswa : Sinta Dahri

NIM : 2020203862202053

Tempat/Tgl. Lahir : Tippulu Kulo, 20 September 2002

Program Studi : Akuntansi Syariah

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Judul Skripsi : Analisis *Flypaper Effect* Pada Pengelolaan Dana
Desa Kecamatan Kulo Kabupaten Sidenreng
Rappang.

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar merupakan hasil karya sendiri. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Parepare, 1 Januari 2025

Penyusun,



SINTA DAHRI

NIM. 2020203862202053



ABSTRAK

Sinta Dahri. *Analisis Flypaper Effect Pada Pengelolaan Dana Desa Kecamatan Kulo Kabupaten Sidenreng Rappang*. (dibimbing oleh Zainal Said dan A. Ayu Frihatni).

Flypaper Effect dalam keuangan publik menggambarkan fenomena di mana peningkatan belanja pemerintah daerah lebih besar daripada peningkatan pendapatan daerah, yang disebabkan oleh adanya transfer dana dari pemerintah pusat. Fenomena ini sering kali berdampak pada alokasi dana yang tidak efisien dan tidak sesuai dengan prioritas kebutuhan daerah. Di Desa Kulo, meskipun terdapat alokasi dana desa yang cukup besar, pengelolaannya tidak selalu berjalan dengan baik. Hal ini disebabkan oleh rendahnya partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan, yang memperburuk dampak *Flypaper Effect* tersebut. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan sumber data primer berupa wawancara dengan pemerintah desa dan masyarakat, serta data sekunder dari buku, dokumen, dan penelitian terdahulu. Teknik analisis data yang digunakan meliputi reduksi data, penyajian data, dan verifikasi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dampak *Flypaper Effect* di Desa Kulo cukup parah, terutama dipengaruhi oleh keterbatasan potensi desa, seperti lokasi geografis yang menghalangi pengembangan objek wisata sebagai sumber pendapatan asli desa. Selain itu, rendahnya partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan pengawasan dana desa turut memperburuk masalah ini. Penelitian ini juga mengidentifikasi langkah-langkah yang dapat diambil untuk mengurangi *Flypaper Effect*, antara lain dengan peningkatan transparansi dalam pengelolaan dana, peningkatan partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan dan pengawasan, serta penguatan pengawasan oleh pihak terkait. Diharapkan temuan dan rekomendasi dari penelitian ini dapat memberikan kontribusi dalam meningkatkan efektivitas pengelolaan dana desa dan meminimalkan dampak negatif dari *Flypaper Effect*.

Kata Kunci : *Flypaper Effect* , Pengelolaan Dana Desa.

DAFTAR GAMBAR

Nomor Gambar	Judul Gambar	Halaman
Gambar 2.1	Gambar kerangka berfikir	32



DAFTAR TABEL

Nomor Tabel	Judul Tabel	Halaman
Gambar 1.1	Tabel Rekapitulasi Anggaran Dana Desa Kulo	5



DAFTAR LAMPIRAN

No. Lampiran	Judul Lampiran	Halaman
1	Surat Izin Melaksanakan Penelitian dari IAIN Parepare	94
2	Surat Izin Melaksanakan Penelitian dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sidenreng Rappang	95
3	Surat Keterangan Selesai Meneliti	96
4	Surat Keterangan Wawancara	97
6	Instrumrn Penelitian/Pedoman Wawancara	101
7	Data Mentah Wawancara	104
8	Foto Dokumentasi Wawancara	110
9	Biodata Penulis	112

PEDOMAN TRANSLITERASI

A. Transliterasi

1. Konsonan

Fonem konsonan dalam bahasa Arab direpresentasikan melalui sistem tulisan Arab menggunakan huruf-huruf, namun dalam transliterasi, beberapa fonem dilambangkan dengan huruf, beberapa dengan tanda, dan yang lainnya dengan kombinasi huruf dan tanda.

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin:

Huruf	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	be
ت	Ta	T	te
ث	ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	je
ح	Ha	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	de
ذ	Žal	Ž	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	er
ز	Zai	Z	zet

س	Sin	S	es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	ḍ	de (dengan titik dibawah)
ط	Ṭa	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)

ع	Ain	‘	koma terbalik ke atas
غ	Gain	G	ge
ف	Fa	F	ef
ق	Qaf	Q	qi
ك	Qaf	K	ka
ل	Lam	l	el
م	Mim	m	em
ن	Nun	n	en
و	Wau	w	we
ه	Ha	h	ha
ء	Hamzah	’	apostrof
ي	Ya	y	ye
ع	Ain	‘	koma terbalik ke atas

Hamzah (ء) yang di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apapun. Jika terletak di tengah atau di akhir, di tulis dengan tanda (').

2. Vokal

- a. Vokal tunggal (*monoftong*) dalam bahasa Arab yang disimbolkan dengan tanda atau harakat disebut sebagai “Huruf Hijaiyah Mati” atau “sukun”, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ	Fathah	a	A
اِ	Kasrah	i	I
اُ	Dammah	u	U

- b. Vokal rangkap (*diftong*) dalam bahasa Arab direpresentasikan oleh gabungan antara harakat dan huruf, dengan transliterasi sebagai kombinasi huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اَيَّ	fathah dan ya	ai	a dan i
اَوَّ	fathah dan wau	au	a dan u

كَيْفَ : kaifa

حَوْلَ : haula

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang ditandai dengan harkat dan huruf, dapat diuraikan menjadi huruf dan tanda dalam transliterasi, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
اَ / آ	fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
اِ	kasrah dan ya	Ī	i dan garis di atas
اُ	dammah dan wau	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

مَاتَ : *māta*

رَمَى : *ramā*

قِيلَ : *qīla*

يَمُوتُ : *yamūtu*

4. Ta Marbutah

Transliterasi untuk *ta marbutah* ada dua:

- 1) *ta marbutah* yang hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah dan dammah, disebut dengan huruf yang memiliki tanda baca (harakat) fathah, kasrah, dan damah, transliterasinya adalah [t].
- 2) *ta marbutah* yang mati atau mendapat harkat sukun adalah huruf “ha” yang berada pada akhir kata tanpa adanya tanda baca atau tanda baca mati, transliterasinya adalah [h].

Jika dalam kata terakhir, *ta martabutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* dan bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta martabutah* itu ditransliterasikan sebagai *ha* (h).

Contoh:

رَوْضَةُ الْجَنَّةِ: *raudāh al-jannah* atau *raudatul jannah*

الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ: *al-madīnah al-fādilah* atau *al-madīnatul fādilah*

الْحِكْمَةُ : *al-hikmah*

5. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid dalam sistem penulisan Arab ditandai dengan sebuah tanda tasydid (ّ), dapat diparafrase dalam transliterasi dengan menggunakan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah. Contoh:

رَبَّنَا : *Rabbanā*

نَجَّيْنَا : *Najjainā*

الْحَقُّ : *al-haqq*

الْحَجَّ : *al-hajj*

نُعَمَّ : *nu‘ima*

عَدُوٌّ : *‘aduwwun*

Jika huruf ي bertasydid diakhir sebuah kata dan didahului oleh huruf kasrah (ى), maka ia literasinya seperti huruf *maddah* (i).

Contoh:

عَرَبِيٌّ : ‘Arabi (bukan ‘Arabiyy atau ‘Araby)

عَلِيٌّ : ‘Ali (bukan ‘Alyy atau ‘Aly)

6. Kata Sandang

Dalam sistem penulisan Arab, kata sandang direpresentasikan oleh huruf *ل* (*alif lam ma'arifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang, *al-*, tetap ditransliterasikan secara standar, baik setelah huruf *syamsiah* maupun huruf *qamariah*. Kata sandang ini tidak memengaruhi pengucapan langsung dari huruf yang mengikutinya. Selain itu, kata sandang dituliskan terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-). Contoh:

الشَّمْسُ : *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)

الزَّلْزَلَةُ : *al-zalzalāh* (bukan *as-zalzalāh*)

الْفَلْسَفَةُ : *al-falsafah*

الْبِلَادُ : *al-bilādu*

7. Hamzah

Aturan transliterasi mengamanatkan penggunaan apostrof (') untuk hamzah ditengahdan akhir kata, tetapi hamzah diawal kata tidak diwakili, karena dalam tulisan Arab, hamzah awal biasanya muncul sebagai huruf alif. Contoh:

تَامُرُونَ : *ta'murūna*

النَّوْءُ : *al-nau'*

شَيْءٌ : *syai'un*

أُمِرْتُ : *Umirtu*

8. Kata Arab yang lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi merupakan ungkapan yang belum disesuaikan secara resmi dalam bahasa Indonesia. Ungkapan-ungkapan

tersebut tidak lagi diubah dari bentuk transliterasi ketika sudah umum digunakan dalam konteks berbahasa Indonesia atau sering muncul dalam tulisan berbahasa Indonesia, seperti Al-Qur'an dan sunnah. Namun, apabila kata-kata tersebut menjadi bagian dari teks Arab, penting untuk tetap menggunakan transliterasi secara penuh, Contoh:

9. *Lafz al-Jalalah* (الله)

Ketika kata “Allah” didahului oleh partikel seperti huruf jar atau berkedudukan sebagai *mudaf ilaih* (frasa nominal), transliterasinya tanpa huruf hamzah, Contoh:

دِينُ اللهِ *Dīnullah* بِاللّٰهِ *billah*

Adapun *ta marbutah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz al-jalalah*, ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

هُمُ فِي رَحْمَةِ اللّٰهِ *Hum fi rahmatillāh*

10. Huruf Kapital

Dalam transliterasi ini, meskipun sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital, kita tetap menggunakan huruf kapital sesuai dengan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD), contohnya, huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri, baik itu orang, tempat, atau bulan, serta huruf pertama pada awal kalimat. Jika nama diri diawali oleh kata sandang “*al-*”, huruf awal nama diri tetap menggunakan huruf kapital, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika “*al-*” berada diawal kalimat, huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (*Al-*), Contoh:

Wa mā Muhammadun illā rasūl

Inna awwala baitin wudi'a linnāsi lalladhī bi

Bakkata mubārakan

Syahru Ramadan al-ladhī unzila fih al-Qur'an

Nasir al-Din al-Tusī

Abū Nasr al-Farabi

Jika seseorang memiliki nama resmi dengan kata Ibnu (anak dari) dan Abū (bapak dari) sebagai nama kedua terakhir, maka dalam daftar pustaka atau daftar referensi, kedua nama terakhir tersebut harus disebutkan sebagai nama akhir, Contoh:

Abū al-Walid Muhammad ibnu Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abū al-Walīd Muhammad (bukan: Rusyd, Abū al-Walid Muhammad Ibnu)

Naşr Hamīd Abu Zaid, ditulis menjadi: Abū Zaid, Naşr Hamīd (bukan: Zaid, Naşr Hamīd Abū)

B. Singkatan

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah:

swt. = *subhānahū wa ta'āla*

saw. = *sallallāhu 'alaihi wa sallam*

a.s. = *'alaihi al-sallām*

H = Hijriah

M = Masehi

SM = Sebelum Masehi

I. = Lahir tahun

w. = Wafat tahun

QS.../...: 4 = QS al-Baqarah/2:187 atau QS Ibrahim/..., ayat 4

HR = Hadis Riwayat

Beberapa singkatan dalam bahasa Arab:

ص = صفحة

د = بدون مكان

صلى الله عليه وسلم = صلعم

ط = طبعة

د = بدون ناشر

إلى آخرها / آخره = الخ

ج = جزء

Beberapa singkatan yang digunakan secara khusus dalam teks referensi perlu dijelaskan kepanjangannya, diantaranya sebagai berikut:

ed. : Editor (atau, eds. [dari kata editors] jika lebih dari satu orang editor). Kerana dalam bahasa Indonesia kata “editor” berlaku baik untuk satu atau lebih editor, maka ia bisa saja tetap disingkat ed. (tanpa s).

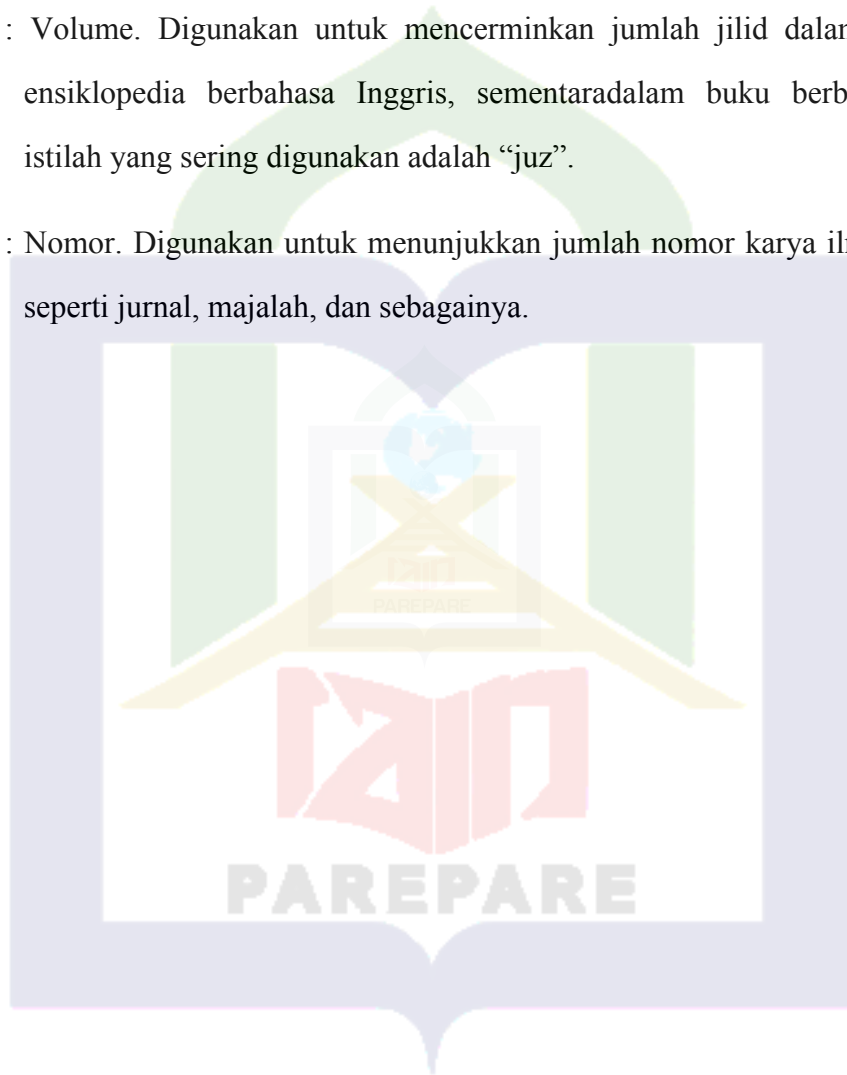
Et al. : “Dan lain-lain” atau “dan kawan-kawan” (singkatan dari *et alia*). Ditulis dengan huruf miring. Alternatifnya, digunakan singkatan dkk. (“dan kawan-kawan”) yang ditulis dengan huruf biasa/tegak.

Cet. : Cetakan. Keterangan frekuensi cetakan buku atau literatur sejenis.

Terj. : Terjemahan (oleh). Singkatan ini juga digunakan untuk penulisan karya terjemahan yang tidak menyebutkan nama penerjemahnya.

Vol. : Volume. Digunakan untuk mencerminkan jumlah jilid dalam buku atau ensiklopedia berbahasa Inggris, sementara dalam buku berbahasa Arab, istilah yang sering digunakan adalah “juz”.

No. : Nomor. Digunakan untuk menunjukkan jumlah nomor karya ilmiah berkala seperti jurnal, majalah, dan sebagainya.



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN KOMISI PENGUJI	iii
KATA PENGANTAR.....	v
PERYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	viii
ABSTRAK	x
DAFTAR GAMBAR	xi
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR LAMPIRAN	xiii
PEDOMAN TRANSLITERASI	xiv
DAFTAR ISI	xxiv
I. PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian.....	9
D. Kegunaan Penelitian.....	9
II. TINJAUAN PUSTAKA.....	11
A. Tinjauan Penelitian Relevan.....	11
B. Tinjauan Teori	15
1. <i>Flypaper Effect</i>	15
2. Teori Fenomenologi.....	17
3. Pengelolaan Dana Desa	20
4. Akuntansi Syariah.....	28

C.	Kerangka Berfikir	32
III.	METODE PENELITIAN	33
A.	Pendekatan dan Jenis Penelitian	33
B.	Lokasi dan Waktu Penelitian	34
C.	Fokus Penelitian	34
D.	Jenis dan Sumber Data	35
E.	Teknik Pengumpulan dan Pengelolaan Data	35
F.	Uji Keabsahan Data	36
G.	Teknik Analisis Data	39
IV.	HASIL DAN PEMBAHASAN	42
A.	Hasil Penelitian	42
B.	Pembahasan	76
V.	PENUTUP	85
A.	Kesimpulan	85
B.	Saran	86
C.	Keterbatasan Penelitian	87
	DAFTAR PUSTAKA	90

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara kepulauan yang dibangun diatas dan terdiri dari desa. Desa adalah pelopor sistem demokrasi yang otonom dan berdaulat penuh. Dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang desa, posisi pemerintah desa menjadi semakin kuat, karena tidak lagi diatur dengan Undang-Undang Nomor 32 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, tetapi diatur dengan undang-undang tersendiri. Kehadiran undang-undang tentang desa tersebut disamping merupakan penguatan status desa sebagai pemerintah masyarakat, sekaligus juga menjadikan desa sebagai basis untuk memajukan masyarakat dan pemberdayaan masyarakat desa. Pendapatan Asli Desa adalah pendapatan yang berasal dari kekayaan desa. Pendapatan Asli Desa antara lain terdiri dari hasil usaha desa, hasil kekayaan desa (seperti kekayaan desa, pasar desa, bangunan desa), hasil swadaya dan partisipasi, hasil gotong royong, dan lain-lain pendapatan asli desa yang sah.¹

Dana Desa, sebagaimana dijelaskan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari APBN, adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten/Kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan

Hani Sri Mulyani, "Analisis Fenomena Fly Paper Effect Dalam Belanja Desa Berdasarkan Pendapatan Asli Desa, Dana Desa Dan Alokasi Dana Desa," *J-AKSI: Jurnal Akuntansi Dan Sistem Informasi* 1, no. 1 (2020): 28–46.

pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Tujuan dari Dana Desa pada dasarnya adalah mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dengan lebih pemerataan pendapatan. Melalui Dana Desa yang jumlahnya mencapai milyaran rupiah, memungkinkan desa melaksanakan berbagai program dan kegiatan pembangunan desa untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat.²

Pengelolaan keuangan desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang pedoman pengelolaan keuangan desa menyebutkan bahwa kebijakan Alokasi Dana Desa itu merupakan sebuah kebijakan daerah yang dengan adanya payung hukum Peraturan Bupati (PERBUP) atau Peraturan Daerah (PERDA). Alokasi Dana Desa yang diberikan kepada desa merupakan hak desa. Berdasarkan Pasa 172 ayat (1) huruf d dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa, menyatakan bahwa salah satu sumber pendapatan desa berasal dari Alokasi Dana Desa yang merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima kota dan Alokasi Dana Desa paling sedikit 10% dari Dana perimbangan yang diterima kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.³

Komponen Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) memuat beberapa jenis komponen pendapatan desa yang mempengaruhi belanja desa, terdiri

² Muhamad Mu'iz Raharjo, *Pengelolaan Dana Desa* (Bumi Aksara, 2021).

³ Wahyu Ningsih, Fefri Indra Arza, and Vita Fitria Sari, "Analisis Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa," *Jurnal Eksplorasi Akuntansi* 2, no. 4 (2020): 3517–32.

dari Pendapatan Asli Desa (PADes) yang didalamnya terdiri dari hasil usaha desa (BUMDES), hasil kekayaan desa, hasil swadaya dan partisipasi masyarakat. Dana transfer seperti Dana Desa (DD) yang berasal dari anggaran pendapatan dan belanja negara melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota, bagi hasil pajak kabupaten atau kota, pendapatan bagian dari retribusi kabupaten atau kota, Alokasi Dana Desa (ADD) dan bantuan keuangan dari pemerintah. Dalam penelitian ini penyusun hanya memfokuskan pada komponen pendapatan asli desa, dana desa dan alokasi dana desa saja, karena ketiga komponen tersebut adalah komponen yang sangat mempunyai peran penting dalam memenuhi kebutuhan belanja desa yang digunakan untuk membangun dan memajukan desa.⁴

Provinsi Sulawesi Selatan merupakan salah satu provinsi yang berada di Indonesia dengan realisasi dana desa yang mencapai Rp. 892,25 Miliar. Sulawesi selatan termasuk dari 34 Provinsi di Indonesia. Dimana terdapat sebanyak 2.255 desa, 792 kelurahan, 301 kecamatan yang terdapat di 21 kabupaten dan 3 kota, dimana salah satunya Kabupaten Sidrap Kecamatan Kulo Desa Kulo. Kecamatan Kulo termasuk dalam wilayah administrasi Kabupaten Sidrap dengan jarak dari kota kecamatan ke kota kabupaten adalah sejauh ± 20 Km. Ibukota Kecamatan Kulo (Kulo) terletak di Desa Kulo yang letaknya berada di jalan poros (Jalan antar Provinsi). Kecamatan Kulo memiliki Luas 7.500.00 Km², yang terdiri dari 6 desa dan 0 kelurahan.

⁴ Hani Sri Mulyani, "Analisis Fenomena Fly Paper Effect Dalam Belanja Desa Berdasarkan Pendapatan Asli Desa, Dana Desa Dan Alokasi Dana Desa," *J-AKSI: Jurnal Akuntansi Dan Sistem Informasi* 1, no. 1 (2020): 28–46.

Desa Kulo yang berada di Kecamatan Kulo yang telah melaksanakan proses perencanaan pembangunan daerah dimana partisipasi masyarakat masih dalam hal turut serta yang seharusnya dalam hal pembangunan harus mengikut sertakan stakeholder yang dapat memberikan masukan terkait masalah pembangunan desa tersebut, serta memberikan gambaran bagaimana pengelolaan desa yang dijalankan untuk meningkatkan kesejahteraan Masyarakat.

Beberapa penelitian terdahulu telah dilakukan oleh Winda Hartati, peneliti tersebut meneliti tentang *Flypaper Effect* pada belanja desa dengan hasil bahwa pembangunan desa berdampak cukup besar terhadap pendapatan transfer. Oleh karena itu, diperlukan upaya bagi aparat pembuat regulasi untuk menetapkan opsi fiskal terkait kebijakan bantuan transfer bagi pemerintah desa dan kebijakan terkait pengoptimalan pendapatan asli desa.⁵

Berdasarkan penelitian yang telah ada peneliti tertarik melakukan penelitian tentang analisis *Flypaper Effect* namun pada tingkat Pemerintah Desa, yaitu pada desa di Kabupaten Sidrap, Desa Kulo. Mengingat bahwa pemerintah desa merupakan lembaga pemerintahan yang paling dekat dengan masyarakat. Disamping itu adanya perbedaan karakteristik dalam pengelolaan belanja pada desa dan daerah juga menjadi perhatian penting dalam pemilihan lingkup penelitian ini. Sebab menurut Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, bahwa porsi belanja desa yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan

⁵ Winda Hartati and Taufeni Taufik, “Analisis *Flypaper Effect* Pada Belanja Desa Di Kabupaten Siak,” *Current Jurnal Kajian Akuntansi Dan Bisnis Terkini* 1, no. 2 (2020).

pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa jauh lebih besar yaitu 70% dari anggaran yang telah ditetapkan. Besarnya persentase belanja untuk kepentingan masyarakat ini diharapkan lebih dapat meningkatkan kemandirian desa. Sehingga dengan perbedaan tersebut, penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran terkait terjadinya fenomena *Flypaper Effect*.

Tabel 1.1 Rekapitulasi Data Desa Kulo

NO.	URAIAN KEGIATAN	ANGGARAN (RP)	REALISASI (RP)	SISA (RP)
A	BELANJA SILPA 2023	Rp 28.307.980	Rp 28.307.980	Rp -
1	Pembangunan Dueker 1 Jl.abbokongan	Rp 5.751.000	Rp 5.751.000	Rp -
2	Pembangunan Dueker 2 Jl.abbokongan	Rp 5.518.000	Rp 5.518.000	Rp -
3	Pembangunan Dueker 7 Jl.perkemahan Anrelli	Rp 11.541.980	Rp 11.541.980	Rp -
4	Pembangunan Dueker 8 Jl.pangkiri	Rp 5.497.000	Rp 5.497.000	Rp -
B	BELANJA KEGIATAN 2023			
1	Bantuan Langsung Tunai (BLT) DD	Rp 129.600.000	Rp 129.600.000	Rp -
2	Dana Operasional 3%	Rp 24.950.070	Rp 14.700.000	Rp 10.250.070
3	Ketahanan Pangan & Hewani 20%			
	Pemberian Bantuan Pertanian (Pupuk Cair)	Rp 16.435.000	Rp 16.422.500	Rp 12.500

	Pemberian Bantuan Pertanian (Handtraktor Mini)	Rp 20.000.000	Rp 17.000.000	Rp 3.000.000
	Pelatihan & Pemberian Bantuan Bibit Ikan	Rp 16.565.000	Rp 16.260.000	Rp 305.000
	Penimbunan Jl.tani Lagoari	Rp 87.625.800	Rp 87.625.800	Rp -
	Pembangunan Deuker 3 Jl. P.Kilang Kaboe	Rp 12.336.000	Rp 12.336.000	Rp -
	Pembangunan Deuker 4 Jl. Tani Kaboe	Rp 13.372.000	Rp 13.372.000	Rp -
4	Pembinaan Kemasyarakatan			
	Insentif Kader Posyandu	Rp 43.164.000	Rp 43.164.000	Rp -
	Kader KPM	Rp 1.962.000	Rp 1.962.000	Rp -
5	Penanganan Stunting			
	Penyuluhan Kesehatan Ibu & Anak serta pemberian Bantuan Tikar Pertumbuhan (Alat Ukur Tinggi Badan untuk Bayi)	Rp 21.772.000	Rp 20.272.000	Rp 1.500.000
6	Kegiatan Penyuluhan & Pelatihan			
	Sosialisasi Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Pada Perempuan & Anak	Rp 11.930.000	Rp 11.730.000	Rp 200.000
	Penyuluhan Tentang Penyakit Seksual.	Rp 11.872.000	Rp 10.372.000	Rp 1.500.000

	HIV/AIDS			
	Sosialisasi Tentang Bahaya Narkoba	Rp 11.820.000	Rp 11.620.000	Rp 200.000
7	BUMDES			
	Penyertaan Modal	Rp 32.916.000		Rp 32.916.000
8	Pembangunan Lainnya			
	Pembangunan Rabat Beton Jl.P.Tappa dsn Tippulu	Rp 144.312.000	Rp 144.312.000	Rp -
	Pembangunan Rabat Beton Jl.Lagogga Kaboe	Rp 167.898.130	Rp 167.888.100	Rp 10.030
	Pembangunan Drainase Jl.Lapangan dsn Tippulu	Rp 36.704.000	Rp 36.642.000	Rp 62.000
	Pembangunan Deukker 9 Depan Posyandu dsn Anrelli	Rp 5.901.000	Rp 5.870.100	Rp 30.900
	Penimbunan Jl.Lapangan dsn Tippulu (Masih sementara proses menunggu pekerjaan alat wales untuk perataan timbunan)	Rp 20.534.000	Rp 20.492.800	Rp 41.200
	JUMLAH	Rp 859.976.980	Rp 809.949.280	Rp 50.027.700

Sumber: Kantor Desa Kulo

Adapun yang menjadi penguat data pada penelitian ini terkait dengan data pengelolaan dana desa itu dapat dilihat dari realisasi pengguna ananggaran DD APBN Desa tahun anggaran 2023. Pada data tersebut, peneliti menyimpulkan bahwa

pada Desa Kulo terdapat kegiatan di setiap tahunnya beserta rincian anggarannya. Di tahun 2022, terdapat belanja SILPA yang dimana anggaran pada kegiatan ini berjumlah Rp. 28.307.980 dan dana yang terealisasi adalah Rp. 28.307.980. ini menandakan bahwa pemerintahan Desa Kulo itu mampu merealisasikan dana Desa dengan baik sesuai dengan SOP atau rancangan pemerintahan. Sedangkan pada tahun 2023, dana desa berjumlah Rp. 129.600.000 untuk kegiatan Bantuan Langsung Tunai (BLU) DD dan yang terealisasi ialah sebesar Rp. 129.600.000 dan untuk kegiatan kedua yaitu Dana Operasional dengan jumlah dan sebesar Rp. 24. 950.000 sedangkan realisasinya yaitu sebesar 14.700.000 serta sisanya sejumlah Rp. 10.250.070. Dan ini membuktikan bahwa pemerintahan Desa Kulo itu Tingkat realisasinya tinggi dengan total jumlah dana di Desa Kulo itu sebesar Rp. 831.669.000 dan yang terealisasi itu sejumlah Rp. 781. 641. 300 sehingga sisanya itu sejumlah Rp. 52.693.900. Dengan adanya perbedaan antara jumlah dana yang dianggarkan dengan jumlah yang terealisasi, sudah menjadi bukti bahwa pemerintah Desa Kulo belum dapat merealisasikan Dana Desa dengan maksimal sesuai dengan kebutuhan. Paradigma pemerintahan yang ideal salah satunya adalah membangun selayaknya dia sebagai pelayan, bukan pada posisi sebagai yang dilayani. Transparansi anggaran menjadi sebuah garansi akuntabilitas sebuah pelayanan publik yang tanpanya akan berpotensi menimbulkan spekulasi dari yang dilayani, entah positif maupun negatif.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana sistem pengelolaan dana desa dan Bagaimana *Flypaper Effect* pada proyek-proyek pembangunan desa di Kecamatan Kulo, Kab. Sidrap?

2. Faktor-faktor apa saja yang meningkatkan atau mengurangi *Flypaper Effect* dalam pengelolaan dana desa?
3. Implikasi kebijakan apa saja yang dapat direkomendasikan untuk efektifitas dana desa berdasarkan temuan *Flypaper Effect*?

C. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui sistem pengelolaan dana Kecamatan Kulo, Kab. Sidrap dan mengetahui dampak *Flypaper Effect* pada proyek-proyek pembangunan desa.
2. Untuk mengetahui Faktor-faktor apa saja yang meningkatkan atau mengurangi *Flypaper Effect* dalam pengelolaan dana desa.
3. Untuk mengetahui Implikasi kebijakan apa saja yang dapat direkomendasikan untuk efektifitas dana desa berdasarkan temuan *Flypaper Effect*.

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat secara teoritis dan praktis sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoritis

Secara teoritis, manfaat dari penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai sumber referensi bagi peneliti lain yang akan melakukan penelitian khususnya bidang manajemen risiko dan disiplin ilmu pengetahuan lainnya

sehingga mampu menghasilkan penelitian yang lebih mendalam, serta menjadi bagian referensi bagi pihak-pihak yang akan melakukan studi terkait.

2. **Kegunaan Praktis**

Adapun manfaat praktis dari penelitian ini adalah:

- a. Bagi Penulis, sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar Sarjana Strata satu Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam di IAIN Parepare, dan menambah ilmu pengetahuan tentang bagaimana pengelolaan yang baik bagi pemerintah.
- b. Bagi Akademik, penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi untuk penelitian selanjutnya dan menjadikan perbandingan dengan penelitian yang lain.
- c. Bagi pemerintah desa, memberikan kontribusi yang bermanfaat atau dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam mengelola dana dengan baik.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Penelitian Relevan

Penelitian ini dilakukan atas dasar penelitian-penelitian terdahulu terkait dengan analisis *Flypaper Effect*, meski semuanya memiliki perbedaan dan persamaan spesifik objek kajian. Beberapa diantaranya yaitu:

1. Penelitian Pertama dilakukan oleh Hani Srimulyani, *Analisis Fenomena Flypaper Effect Dalam Belanja Desa, Berdasarkan Pendapatan Asli Desa, Dana Desa dan Alokasi Dana Desa*. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa belanja desa tergolong tinggi, hal ini dikarenakan pendapatan desa yang diperoleh oleh setiap desa tahun ketahun semakin meningkat sehingga mengakibatkan kebutuhan belanja desanya juga meningkat. Dapat disimpulkan bahwa pendapatan asli desa, dana desa dan alokasi dana desa berpengaruh terhadap belanja desa. Sehingga hipotesis keempat yang menyatakan bahwa pendapatan asli desa, dana desa dan alokasi dana desa berpengaruh terhadap belanja desa dapat dibuktikan.⁶

Persamaan antara penelitian yang dilakukan oleh penulis dengan penelitian terdahulu terletak pada penggunaan metode penelitian yang sama, yaitu metode kualitatif, yang memungkinkan peneliti untuk menggali informasi mendalam mengenai fenomena yang sedang diteliti. Meskipun

⁶ Mulyani, “Analisis Fenomena Fly Paper Effect Dalam Belanja Desa Berdasarkan Pendapatan Asli Desa, Dana Desa Dan Alokasi Dana Desa,” 2020.

kedua penelitian ini menggunakan pendekatan yang serupa, perbedaan utama terletak pada subjek yang diteliti. Peneliti terdahulu lebih fokus pada aspek belanja desa, yakni bagaimana dana desa digunakan untuk berbagai keperluan dalam pemerintahan dan pembangunan desa. Sementara itu, penelitian yang dilakukan oleh penulis saat ini lebih berfokus pada pengalokasian dana desa, yaitu bagaimana dana tersebut dialokasikan dan didistribusikan untuk mencapai tujuan pembangunan yang diinginkan. Dengan demikian, meskipun metode yang digunakan sama, kedua penelitian ini memiliki fokus yang berbeda dalam menjawab permasalahan yang ada.

2. Penelitian Kedua oleh Hilmy Hafizh Managta, *Analisis Flypaper Effect Belanja Daerah dan Pengaruhnya Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Maluku Utara*. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kabupaten/kota di Provinsi Maluku Utara tidak mengalami fenomena *Flypaper Effect*, serta Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Maluku Utara sepenuhnya dipengaruhi oleh Pendapatan Asli Daerah dan Belanja Daerah, sedangkan pada DAU dan DAK tidak berpengaruh secara langsung terhadap Pertumbuhan Ekonomi, namun berpengaruh secara tidak langsung melalui mediasi Belanja Daerah. Di kabupaten/kota Provinsi Maluku Utara tidak terjadi fenomena *Flypaper Effect* dan tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi, secara langsung pertumbuhan ekonomi

kabupaten/kota di Provinsi Maluku Utara dipengaruhi oleh PAD dan BD, sedangkan secara tidak langsung dipengaruhi oleh DAU dan DAK.⁷

Persamaan antara penelitian penulis dan penelitian terdahulu terletak pada subjek yang sama, yaitu *Flypaper Effect*, yang terjadi secara merata di seluruh Indonesia. Namun, perbedaannya terletak pada fokus penelitian, di mana penelitian sebelumnya mengkaji *Flypaper Effect* secara umum di Indonesia, sementara penelitian penulis kali ini terkhusus meneliti fenomena tersebut di tingkat desa, dengan tujuan untuk memahami lebih dalam bagaimana dana desa dialokasikan dan pengaruhnya terhadap pengelolaan serta pembangunan di tingkat lokal.

3. Penelitian ketiga yakni dari Dilah Masyita dengan judul penelitian “*Analisis Flypaper Effect Pada Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum Dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Belanja Daerah Di Provinsi Aceh Tahun 2018-2022*”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pendapatan asli daerah, dana alokasi umum dan dana alokasi khusus terhadap belanja daerah, serta untuk mengetahui adanya *Flypaper Effect* pada pengaruh pendapatan asli daerah, dana alokasi umum dan dana alokasi khusus terhadap belanja daerah. Penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dengan menggunakan data sekunder. Metode analisis data yang digunakan adalah regresi data panel dengan pendekatan *Fixed Effect Model* yang diolah menggunakan *Eviews*. Hasil dari penelitian ini secara parsial

⁷ Hilmy Hafizh Managta, “Analisis *Flypaper Effect* Belanja Daerah Dan Pengaruhnya Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Maluku Utara,” *Jurnal Sosial Dan Sains* 3, no. 11 (2023): 1187–96.

menunjukkan bahwa PAD dan DAU berpengaruh positif terhadap Belanja Aceh tahun 2018-2022. Sementara, DAK berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap Provinsi Aceh tahun 2018-2022. Tingkat koefisien DAU dan DAK jauh lebih tinggi tingkat dalam mempengaruhi belanja daerah. Hal ini menunjukkan bahwa Pemerintah Aceh masih memiliki ketergantungan terhadap Pemerintah Pusat dalam mengelola keuangan sehingga membuktikan pada kabupaten/kotadi Provinsi Aceh tahun 2018-2022 terjadi *Flypaper Effect*.⁸

Persamaan antara penelitian yang dilakukan penulis dan penelitian terdahulu terletak pada subjek yang sama, yaitu *Flypaper Effect*, yang umumnya terjadi di tingkat provinsi. Penelitian terdahulu banyak mengkaji fenomena ini pada tingkat provinsi di Indonesia, melihat bagaimana pengaruh dana yang diterima oleh pemerintah daerah terhadap belanja publik. Namun, perbedaan utama terletak pada fokus penelitian, di mana penelitian penulis kali ini lebih terfokus pada *Flypaper Effect* di tingkat desa. Peneliti ingin mengeksplorasi bagaimana fenomena tersebut terjadi di tingkat desa, khususnya terkait dengan pengalokasian dan penggunaan dana desa, serta dampaknya terhadap pembangunan desa secara lebih spesifik. Dengan fokus pada tingkat desa, penelitian ini bertujuan untuk memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang bagaimana aliran dana desa memengaruhi keputusan dan kebijakan pembangunan di tingkat lokal.

⁸ Dilah Masyita, “Analisis *Flypaper Effect* Pada Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum Dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Belanja Daerah Di Provinsi Aceh Tahun 2018-2022”.

B. Tinjauan Teori

1. *Flypaper Effect*

Fokus utama dalam penelitian ini adalah *flypapaer effect*. *Flypaper Effect* adalah suatu fenomena pada suatu kondisi ketika Pemerintah Daerah merespon belanja daerahnya lebih banyak berasal dari transfer keuangan pusat daerah. *Flypaper Effect* adalah suatu kondisi yang terjadi saat pemda merespon belanja lebih banyak (lebih boros) dengan menggunakan dana transfer (*grants*) yang diproksikan dengan DAU dari pada menggunakan kemampuan sendiri yang diproksikan dengan PAD. *Flypaper Effect* diukur dari slope koefisien dana perimbangan dan PAD terhadap variabel prediktor belanja daerah. Kecenderungan slope koefisien belanja daerah yang lebih besar dan positif terhadap belanja daerah mengindikasikan terjadi *Flypaper Effect*.⁹ Fenomena *Flypaper Effect* terjadi dalam dua versi, pertama, merujuk pada peningkatan pajak daerah dan anggaran belanja pemerintah yang berlebihan. Kedua, mengarah pada elastisitas pengeluaran terhadap transfer yang tinggi dari pada elastisitas pengeluaran terhadap penerimaan pajak daerah. Dalam khasanah ekonomi, telaah mengenai *Flypaper Effect* dapat dikelompokkan menjadi 2 aliran pemikiran, yaitu model birokratik (*bureaucratic model*) dan ilusifiskal (*fiscal illusion model*). Model birokratik menelaah *Flypaper Effect* dari sudut pandang dari birokrat, sedangkan model ilusifiskal (*fiscal illusion model*) mendasarkan kajiannya dari sudut pandang masyarakat yang mengalami keterbatasan informasi terhadap anggaran

⁹ Wenjuan Zhang et al., "The Effect of Procrastination on Physical Exercise among College Students—The Chain Effect of Exercise Commitment and Action Control," *International Journal of Mental Health Promotion* 26, no. 8 (2024): 611–22, <https://doi.org/10.32604/ijmhp.2024.052730>.

pemerintah daerahnya. Niskanen (1968) mengawali aliran pemikiran birokratik. Menurut pandangannya, posisi birokrat lebih kuat dalam pengambilan keputusan publik. Niskanen (1968) mengasumsikan birokrat berperilaku memaksimalkan anggaran sebagai proksi kekuasaannya. Dengan asumsi ini barang public disediakan pada posisi biaya rata-rata sama dengan harganya. Pada posisi biaya marginal lebih tinggi dari pada harganya, kuantitas barang public menjadi tersedia terlalu banyak. Dengan demikian, transfer akan menurunkan harga barang public sehingga memicu birokrat untuk membelanjakan lebih banyak anggaran. Model birokratik secara implicit menegaskan *Flypaper Effect* sebagai akibat dari perilaku birokrat yang lebih leluasa membelanjakan transfer dari pada menaikkan pajak.

Permasalahan yang sering muncul saat ini yang menyebabkan terjadinya *Flypaper Effect* di suatu daerah adalah pemerintah daerah lebih berhati-hati dalam menggunakan pendapatan asli daerahnya dibandingkan dengan penggunaan transfer pusat. Daerah yang memiliki kemampuan keuangan rendah akan mendapatkan dana transfer dalam jumlah relatif besar, sebaliknya daerah dengan kemampuan keuangan tinggi akan mendapatkan dana transfer dalam jumlah kecil. ketika transfer pusat yang diperoleh besar, maka pemerintah daerah berusaha agar pada periode berikutnya transfer pusat yang diperoleh relatif tetap. Dengan arti lain pemberian bantuan dana seharusnya menjadi stimulus peningkatan kemandirian, justru direspon

berbeda oleh daerah. Daerah menjadi tidak mandiri, justru semakin bergantung kepada pemerintah pusat.¹⁰

2. Teori Fenomenologi

Fenomenologi adalah aliran filsafat yang berfokus pada studi tentang pengalaman langsung dan kesadaran manusia terhadap dunia. Istilah ini pertama kali diperkenalkan oleh filsuf Jerman, Edmund Husserl, pada awal abad ke-20. Fenomenologi berusaha untuk memahami bagaimana kita sebagai individu mengalami dan memberi makna pada dunia sekitar kita, dengan menekankan pada pengamatan dan analisis fenomena sebagaimana mereka muncul dalam kesadaran kita, tanpa prasangka atau asumsi. Fenomenologi tidak hanya digunakan dalam filsafat, tetapi juga telah memengaruhi berbagai bidang seperti psikologi, sosiologi, dan ilmu-ilmu sosial lainnya, dengan tujuan memahami pengalaman manusia dari sudut pandang subjektif dan langsung.¹¹

Fenomenologi adalah pendekatan yang dimulai oleh Edmund Husserl dan dikembangkan oleh Martin Heidegger untuk memahami atau mempelajari pengalaman hidup manusia. Pendekatan ini berevolusi sebuah metode penelitian kualitatif yang matang dan dewasa selama beberapa dekade pada abad ke dua puluh. Fokus umum penelitian ini untuk memeriksa/meneliti esensi atau struktur pengalaman ke dalam kesadaran

¹⁰ Dzulhidayat, *Analisis Peran Gaya Kepemimpinan Dan Pelatihan Terhadap Motivasi Kerja Karyawan Pada Koperasi Unit Desa (KUD) Citra Sawit Mandiri Dalam Perspektif Islam*, Skripsi, 2022.

¹¹ Donny Gahral Adian, *Pengantar Fenomenologi* (Penerbit Koekoesan, 2016).

manusia. Pendekatan ini berevolusi sebuah metode penelitian kualitatif yang matang dan dewasa selama beberapa dekade pada abad ke dua puluh. Fokus umum penelitian ini untuk memeriksa/meneliti esensi atau struktur pengalaman ke dalam kesadaran manusia. Kemunculan fenomenologi oleh Husserl dilatar belakangi oleh kenyataan terjadinya krisis ilmu pengetahuan. Dalam krisis ini, ilmu pengetahuan tidak bias memberikan nasihat apa-apa bagi manusia. Dalam pengertian yang paling inti, istilah fenomenologi merujuk pada teori. Tradisi fenomenologi memfokuskan perhatiannya terhadap pengalaman sadar seorang individu. Teori komunikasi yang masuk dalam tradisi fenomenologi berpandangan bahwa manusia secara aktif mempresentasikan pengalaman mereka sehingga mereka dapat memahami lingkungannya melalui pengalaman personal dan langsung dengan lingkungan. Tradisi fenomenologi memberikan penekanan sangat kuat pada persepsi dan interpretasi dari pengalaman subjektif manusia. Pendukung teori ini berpandangan bahwa cerita atau pengalaman individu adalah lebih penting dan memiliki otoritas lebih besar dari pada hipotesis penelitian sekalipun. spekulatif tentang penampilan pengalaman, dan dalam penggunaan awal, pengertian fenomenologi dikaitkan dengan dikotomi “phenomenon-noumenon” suatu perbedaan antara yang tampak (phenomenon) dan yang tidak tampak (neomenon). Fenomenologi husserl merupakan usaha spekulatif untuk menentukan hakikat yang seluruhnya didasarkan atas pengujian dan penganalisisan terhadap yang tampak.¹²

¹² Zikri Fachrul Nurhadi, *Teori Komunikasi Kontemporer* (Prenada Media, 2017).

Dalam fenomenologi terdapat 2 konsep dasar yang dikemukakan oleh Stanley Deetz, dalam Littlejohn & Foss, sebagai berikut:

1. Pengetahuan ditemukan secara langsung dalam pengalaman sadar, kita akan mengetahui dunia ketika kita berhubungan dengannya.
2. Makna benda terdiri atas kekuatan benda dalam kehidupan seseorang. Dengan kata lain, bagaimana anda berhubungan dengan benda menentukan maknanya bagi anda.¹³

Adapun tradisi fenomenologi menurut Littlejohn dan Foss terbagi dalam 3 jenis, yaitu Fenomenologi Klasik, Fenomenologi Persepsi, dan Fenomenologi Hermeneutik. Berikut penjelasan dari ketiga jenis Fenomenologi tersebut:

1. Fenomenologi Klasik

Percaya pada kebenaran hanya bisa didapatkan melalui pengarahannya pengalaman, artinya hanya mempercayai suatu kebenaran dari sudut pandangannya tersendiri atau objektif.¹⁴

2. Fenomenologi Persepsi

Percaya pada suatu kebenaran bisa didapatkan dari sudut pandang yang berbeda-beda, atau hanya membatasi fenomenologi pada obyektivitas atau bisa dikatakan lebih subyektif.¹⁵

¹³ Muhammad Farid and M Sos, *Fenomenologi: Dalam Penelitian Ilmu Sosial* (Prenada Media, 2018).

¹⁴ Suwardi Endraswara, "Metodologi Penelitian Fenomenologi Sastra," 2021.

3. Fenomenologi Hermeneutik

Percaya pada suatu kebenaran yang ditinjau baik dari aspek obyektifitas maupun subyektifitasnya, dan juga disertai dengan analisis guna menarik suatu kesimpulan.¹⁶

3. Pengelolaan Dana Desa

Pengelolaan yaitu suatu rangkaian tugas yang dilakukan oleh seorang atau sekelompok orang demi mencapai tujuan yang diinginkan. Salah satu aspek yang harus dimiliki pemangku kepentingan desa khususnya aparat desa adalah pengetahuan dan pemahaman dalam pengelolaan dana desa. Aspek ini harus dimiliki guna mewujudkan akuntabilitas dan transparansi keuangan desa.¹⁷

Pengelolaan keuangan desa yang telah diatur dalam Permendagri No 113 Tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan desa menjadi pedoman khusus bagi pemerintah desa untuk mengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) agar menciptakan relasi yang maksimal dan mampu mencapai perkembangan pembangunan setiap tahunnya.¹⁸

Berkaitan dengan peran tersebut, diatur dalam UU (undang-Undang) No.6 Tahun 2014 tentang Desa (selanjutnya disebut Undang-Undang Desa)

¹⁵ Zikri Fachrul Nurhadi, *Teori Komunikasi Kontemporer* (Prenada Media, 2017).

¹⁶ Masykur Wahid, *Teori Interpretasi Paul Ricoeur* (LKIS PELANGI AKSARA, 2015).

¹⁷ Muhamad Mu'iz Raharjo, *Pengelolaan Dana Desa* (Bumi Aksara, 2021).

¹⁸ Tim Visi Yustisia, *Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Dan Peraturan Terkait* (Visimedia, 2015).

yang menjelaskan bahwa desa merupakan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan negara kesatuan Republik Indonesia. Dengan adanya kewenangan yang diberikan ke pemerintahan desa, maka diharapkan desa dapat berkembang menjadi suatu wilayah yang maju, mandiri dan demokratis. Untuk mewujudkan desa yang maju, mandiri dan demokratis, membutuhkan anggaran dalam pembangunan dan pemberdayaan masyarakat di suatu desa. Anggarantersebut diatur dalam PP (Peraturan Pemerintah) No. 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang menyebutkan bahwa dana desa adalah dana yang bersumber dari APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) Kabupaten/Kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat. Berkaitan dengan pengelolaan dana desa, dijelaskan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Proses pengelolaan dana desa dimaksud dimulai dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban. Semua proses pengelolaan dana desa harus didasari asa transparansi, akuntabel dan partisipatif. Dalam pengelolaan dana desa,

dituntut adanya suatu aspek tata pemerintahan yang baik (*Good Governance*) dimana salah satu pilarnya adalah akuntabilitas.¹⁹

Dalam pengelolaan dana desa, salah satu hal penting yang harus diterapkan yaitu melibatkan masyarakat. Dengan melibatkan masyarakat, pemerintah perlu mengadakan kegiatan menggunakan pola swakelola yang artinya mengupayakan pelaksanaan serta perencanaan yang dilaksanakan secara mandiri oleh masyarakat dengan menggunakan bahan baku lokal dan tenaga kerja setempat sehingga alokasi dana untuk pembangunan desa tidak mengalir ke tempat lain.

Dalam mengelola dana desa diperlukan mekanisme pengawasan yang bertujuan agar pengelolaan keuangan desa semakin akuntabel. Untuk meningkatkan keefektifan mekanisme pengawasan dan meminimalisir terjadinya pelanggaran, maka akan diberikan sanksi pada pihak yang melaksanakan tugas tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.²⁰

Adapun Komponen-Komponen Laporan Keuangan Desa terdiri dari beberapa, diantaranya :

a) Transparansi

Transparansi berarti keterbukaan (*openness*) pemerintah dalam memberikan informasi yang terkait dengan aktivitas pengelolaan sumber

¹⁹ Taufeni Taufik, "Pengelolaan Keuangan Desa Dalam Sistem Keuangan Negara Republik Indonesia," *Jurnal Ekonomi Universitas Riau* 17, no. 01 (2009): 8754.

²⁰ S H Aminuddin Ilmar, *Hukum Tata Pemerintahan* (Prenada Media, 2016).

daya publik kepada pihak-pihak yang membutuhkan informasi. Pemerintah berkewajiban memberikan informasi keuangan dan informasi lainnya yang akan digunakan untuk pengambilan keputusan oleh pihak-pihak yang berkepentingan. Transparansi adalah terbuka mengenai informasi kepada publik, dan apabila publik membutuhkan informasi tersebut, maka publik akan segera mendapatkannya. Dengan adanya keterbukaan tersebut, dana desa yang dikelola dapat dikontrol dan diawasi dengan baik oleh pihak yang berwenang, sehingga, dana desa yang penggunaannya bertujuan untuk pemberdayaan masyarakat tersebut dapat terserap dengan baik. Semakin tinggi tingkat transparansi maka semakin baik pemerintah desa dalam pengelolaan alokasi dana desa. Semakin transparan pemerintah terhadap perencanaan pembangunan dan pengelolaan keuangan, maka semakin mudah untuk mewujudkan pemerintahan yang akuntabel.

Dalam pengelolaan dana desa, transparansi ini dimaksudkan agar aparat desa bertindak dan/atau berperilaku sesuai dengan aturan hukum dan etika yang berlaku, dan juga sesuai dengan amanat yang diberikan masyarakat dalam pengelolaan dana desa.²¹

b) Akuntabel

Akuntabel adalah istilah yang merujuk pada kemampuan untuk memberikan pertanggungjawaban atau menjelaskan secara jelas dan

²¹ Kiky Srirejeki, "Tata Kelola Keuangan Desa," *Jurnal Akuntansi Dan Bisnis* 15, no. 1 (2015): 33–37.

terbuka mengenai tindakan, keputusan, atau penggunaan sumber daya yang telah dilakukan. Dalam konteks organisasi atau pemerintahan, akuntabilitas berarti bahwa setiap individu atau lembaga harus dapat mempertanggungjawabkan segala sesuatu yang telah mereka lakukan, baik kepada atasan, masyarakat, maupun pihak terkait lainnya.

Secara umum, akuntabilitas mencakup dua hal yaitu tanggung jawab dan transparansi. Tanggung jawab yaitu orang atau organisasi harus siap menerima konsekuensi dari tindakan mereka. Sedangkan transparansi yakni proses, keputusan, dan hasil yang dicapai harus dapat dipahami dan diperiksa oleh pihak yang berkepentingan.

Akuntabilitas sangat penting dalam berbagai bidang, seperti dalam manajemen keuangan, pemerintahan, dan organisasi, untuk memastikan bahwa segala sesuatu dilakukan dengan cara yang sesuai, jujur, dan bertanggung jawab.²²

c) Partisipatif

Partisipatif adalah, keikutsertaan seseorang atau sekelompok anggota masyarakat dalam suatu kegiatan. Pendapat yang berbeda mengemukakan bahwa partisipatif sebagai kesediaan untuk membantu berhasilnya setiap program sesuatu kemampuan setiap orang tanpa berarti mengorbankan kepentingan diri.” Dapat disimpulkan bahwa partisipatif adalah proses keterlibatan aktif dari seseorang, atau sekelompok orang

²² M Si Gaffar, Muhammad Ichsan Gaffar, and M Ak SE, *Transparansi Keuangan Dan Peran Audit: Menghadapi Tantangan Era Digital* (Takaza Innovatix Labs, 2024).

(masyarakat) secara sadar untuk berkontribusi dan secara sukarela dalam program pembangunan. Masyarakat dilibatkan secara langsung mulai dari perencanaan/pengambilan keputusan, pelaksanaan, monitoring sampai pada tahap evaluasi.

Pentingnya partisipatif sebagai berikut: pertama, partisipasi masyarakat merupakan suatu alat guna memperoleh informasi mengenai kondisi, kebutuhan, dan sikap masyarakat setempat, yang tanpa kehadirannya program pembangunan serta proyek-proyek akan gagal; kedua, bahwa masyarakat akan lebih mempercayai proyek atau program pembangunan jika merasa dilibatkan dalam proses persiapan dan perencanaannya, karena mereka akan lebih mengetahui seluk-beluk proyek tersebut dan akan mempunyai rasa memiliki terhadap proyek tersebut; ketiga, bahwa merupakan suatu hak demokrasi bila masyarakat dilibatkan dalam pembangunan masyarakat mereka sendiri.²³

d) Tertib dan Disiplin Anggaran

Tertib dan disiplin anggaran merujuk pada prinsip-prinsip yang diterapkan dalam pengelolaan anggaran untuk memastikan bahwa semua proses perencanaan, penggunaan, dan pelaporan dana dilakukan sesuai dengan aturan dan standar yang telah ditetapkan.

Tertib dan disiplin anggaran yaitu pengelolaan keuangan desa harus mengacu pada aturan atau pedoman yang melandasinya. Menurut Permendagri No.20 Tahun 2018, pengelolaan keuangan desa dikelola

²³ Syamsuddin Haris, *Desentralisasi Dan Otonomi Daerah: Desentralisasi, Demokratisasi & Akuntabilitas Pemerintahan Daerah* (Yayasan Obor Indonesia, 2004).

dalam masa satu tahun anggaran yakni tanggal 1 Januari sampai tanggal 31 Desember. Adapun indikator tertib dan disiplin anggaran yang tertuang dalam Permendagri No. 20 Tahun 2018 yakni:

1. Pengelolaan keuangan dikelola dalam tahun anggaran tanggal 1 Januari sampai 31 Desember.
2. Pelaksana anggaran dilakukan oleh kaur dan kasi.
3. Tatacara penggunaan anggaran diatur dalam peraturan Bupati/Walikota mengenai pengelolaan keuangan desa.²⁴

PSAK 101 mengatur tentang persyaratan penyajian laporan keuangan, struktur laporan keuangan, dan persyaratan minimal isi laporan keuangan umum untuk entitas syariah agar dapat dibandingkan baik dengan laporan keuangan periode sebelumnya maupun dengan laporan keuangan entitas syariah lain. Entitas syariah yang dimaksud di PSAK ini adalah entitas yang melaksanakan transaksi syariah sebagai kegiatan usaha berdasarkan prinsip-prinsip syariah yang dinyatakan dalam anggaran dasarnya. Oleh karena itu, penyajian laporan keuangan untuk entitas syariah di Indonesia selalu mengacu pada PSAK 101.²⁵

Tujuan umum laporan keuangan entitas syariah sesuai PSAK 101 adalah untuk memberikan informasi mengenai posisi keuangan, kinerja

²⁴ Rahmawati Halim et al., *Partisipasi Politik Masyarakat: Teori Dan Praktik*, vol. 1 (SAH MEDIA, 2016).

²⁵ Kharisma Utami, *Analisis Penerapan Akuntansi Psak No.101 Pada Penyajian Laporan Keuangan Bank Bukopin Syari'Ah*, Utami, Kharisma, 2018.

keuangan, dan arus kas entitas syariah yang bermanfaat bagi sebagian besar pengguna laporan keuangan dalam membuat keputusan ekonomi. Dalam rangka mencapai tujuan tersebut, suatu laporan keuangan menyajikan informasi mengenai entitas syariah yang meliputi: aset, liabilitas, dana syirkah temporer, ekuitas, pendapatan dan beban termasuk keuntungan dan kerugian, kontribusi dari dan distribusi kepada pemilik dalam kapasitasnya sebagai pemilik, arus kas dan zakat, dan dana kebajikan (IAI SAKS, 2017, hal.3 PSAK 101).

Di samping tujuan umum itu, menurut PSAK 101, laporan keuangan entitas syariah juga memiliki tujuan lain, yaitu;

1. Meningkatkan kepatuhan terhadap prinsip syariah dalam semua transaksi dana kegiatan;
2. Mengetahui informasi kepatuhan entitas syariah terhadap prinsip syariah, serta informasi aset, kewajiban, pendapatan, dan beban yang tidak sesuai dengan prinsip syariah bila ada. Serta bagaimana perolehan dan penggunaannya;
3. Informasi untuk membantu mengevaluasi pemenuhan tanggung jawab entitas syariah terhadap amanah dalam mengamankan dana, menginvestasikannya pada tingkat keuntungan yang layak;
4. Informasi mengenai tingkat keuntungan investasi yang diperoleh penanam modal dan pemilik dana syirkah temporer. Serta informasi mengenai pemenuhan kewajiban (Obligation) fungsi

sosial entitas syariah, termasuk pengelolaan, dan penyaluran zakat, infaq, sedekah, dan wakaf.²⁶

4. Akuntansi Syariah

Islam mengajarkan studi tentang perencanaan jelas terperinci dalam Al- Qurandan as-sunnah sebagai sumber segala ilmu yang mejadi pedoman untuk menyelesaikan berbagai macam permasalahan dalam hidup. Begitupun dengan akuntabilitas dan transparansi sebagai bentuk pengelolaan dana desa. Berdasar pada perspektif manajemen keuangan syariah tentang pengelolaan dana desa harus sesuai dengan sifat Nabi Muhammad saw. yaitu Siddiq (Jujur), Fathanah (Cerdas), Amanah (Terpercaya) dan Tabliq (Transparan).²⁷

Ash-Shidqu adalah keballkan dari dusta, (shadaqa, yashduqu, shadqan, shidqan dan tashdiqan). Siddiq (jujur) dapat diartikan sebagai amanah dan dapat dipercaya. Orang yang memiliki sifat biasanya dapat mendapat kepercayaan dari orang lain. Karakter jujur merupakan salah satu rahasia diri seseorang untuk menarik kepercayaan umum, karena orang yang jujur senantiasa berusaha untuk menjaga amanah. Jujur dapat juga diartikan kehati-hatian diri seseorang dalam memegang amanah yang telah dipercayakan oleh orang lain kepada dirinya. Orang yang memiliki kejujuran, masu")dalam kategori orang yang pantas diberi amanah karena

²⁶ S.E.M.S. Dr. Lia Dahlia Iryani and M A Qisthi Wajanatin Alfafa, Buku Ajar Akuntansi Syariah: Landasan Dan Implementasi Akad Murabahah, Musyarakah, Dan Mudharabah (Uwais Inspirasi Indonesia, 2024).

²⁷ Sri Kasnelly, "Teori Dan Praktek Akuntansi Syariah," *Al-A'mal: Jurnal Manajemen Bisnis Syariah* 1, no. 1 (2021): 21–32.

orang semacam ini memegang teguh terhadap sesuatu dengan sungguh-sungguh dan penuh tanggung jawab.²⁸

Fathanah (cerdas) dalam ilmu akuntansi berarti mengerti, memahami, dan menghayati cara mendalam segala hal yang terjadi dalam tugas dan kewajiban. Sifat ini akan menumbuhkan kreativitas dan kemampuan untuk melakukan berbagai macam inovasi yang bermanfaat. Kreativitas dan inovatif hanya mungkin dimiliki ketika seseorang selalu berusaha untuk menambah berbagai ilmu pengetahuan, peraturan, dan informasi baik yang berhubungan dengan pekerjaan-nya maupun perusahaan secara umum.²⁹

Amanah memiliki pengertian luas dan beragam. seperti yang dikemukakan oleh beberapa mufassir, amanah merupakan sebuah taklif yang harus dilaksanakan atau sebuah titipan yang harus dikembalikan kepada pemiliknya. Semua yang berkaitan dengan hal bisa berupa urusan agama maupun duniawi. yang mana menjalankan amanah tersebut bisa memberikandampak yang positif yaitu ketenangan hati dan menghilangkan rasa takut dan cemas.³⁰

Tabliq mengarah pada prinsip penyampaian informasi yang jujur dan transparan, meskipun penggunaan istilah ini tidak umum secara langsung

²⁸ Imam Musbikin, *Pendidikan Karakter Jujur* (Nusamedia, 2021).

²⁹ D Hafidhuiddin and B Handrianto, *Agar Layar Tetap Berkembang* (Gema Insani, 2006).

³⁰ SHEILA MARIA BELGIS PUTRI AFFIZA, *Analisis Pelaksanaan Rekrutmen, Seleksi, Dan Penempatan Tenaga Kerja Pada Bank Syariah Indonseia Kc Panorama Kota Bengkulu, Jurnal Rekrutmen*, 2022.

dalam literatur akuntansi syariah. Namun, jika kita melihatnya dalam konteks prinsip akuntansi syariah, *tabligh* dapat dihubungkan dengan kejujuran dan transparansi dalam penyampaian laporan keuangan dan informasi terkait kepada para pemangku kepentingan.³¹

Akuntabilitas dan transparansi merupakan bentuk pengelolaan dana desa. Pengelolaan keuangan desa pada penerapan akuntabilitas perspektif islam terwujud jika pemerintah desa memenuhi kewajibannya menyampaikan amanah atau pertanggungjawaban kepada masyarakat atau instansi yang berhak menerima pertanggungjawaban. Dimana pertanggungjawaban tersebut harus berdasarkan hukum yang telah ditetapkan sebelumnya seperti peraturan desa dan prinsip-prinsip syariah.

Kaitan antara akuntansi syariah dengan *Flypaper Effect* dapat dilihat pada beberapa aspek berikut:

1. Dalam akuntansi syariah, hal ini bisa berisiko, karena dana yang diterima oleh organisasi atau lembaga keuangan syariah harus dikelola secara transparan, adil, dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Jika dana tersebut digunakan tanpa memperhatikan kebutuhan riil atau tanpa perencanaan yang matang, bisa jadi bertentangan dengan prinsip akuntansi syariah yang menuntut akuntabilitas dan penggunaan dana yang bijaksana.
2. Pengalokasian Zakat dan Dana Sosial: Dalam sistem akuntansi syariah, terdapat alokasi dana untuk kegiatan sosial seperti zakat, infaq, dan

³¹ Armawati Arbi, *Psikologi Komunikasi Dan Tabligh* (Penerbit AMZAH, 2012).

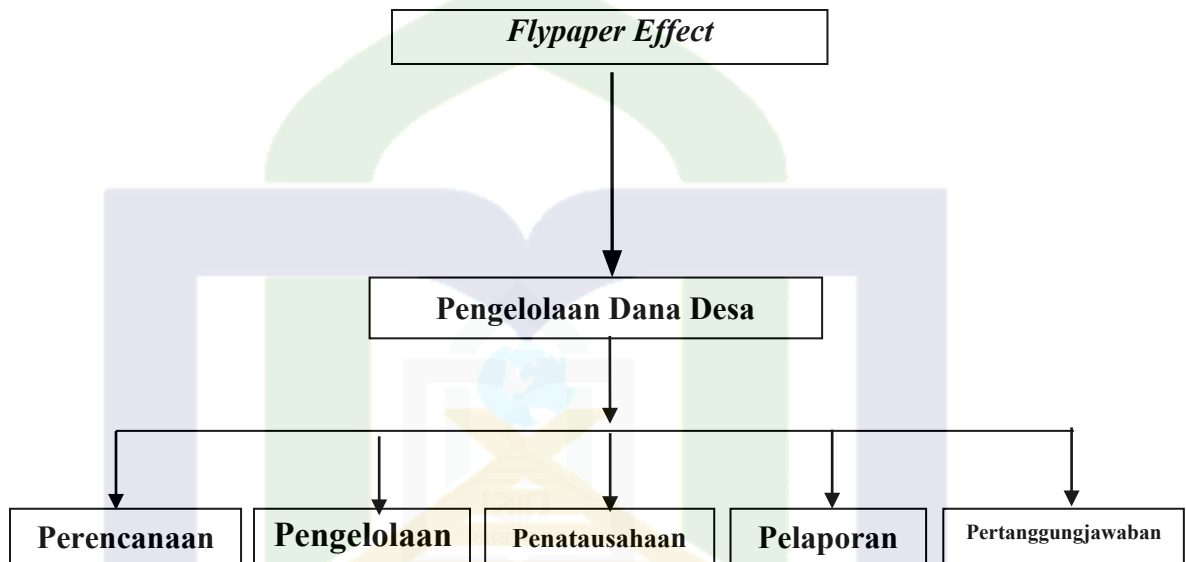
sedekah. Fenomena *Flypaper Effect* bisa terjadi ketika dana sosial ini diterima oleh lembaga pengelola zakat atau lembaga sosial lainnya dan digunakan tanpa memperhatikan urgensi atau efektivitasnya. Dalam konteks ini, akuntansi syariah bertanggung jawab untuk memastikan bahwa dana zakat digunakan secara optimal untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang lebih mendesak, sesuai dengan prinsip-prinsip Islam.

3. **Transparansi dan Akuntabilitas:** Akuntansi syariah menekankan transparansi dalam pengelolaan keuangan. Jika *Flypaper Effect* terjadi di lembaga syariah, pengelolaan dana yang tidak efisien atau tidak terencana dengan baik dapat mengurangi transparansi dan akuntabilitas. Oleh karena itu, dalam akuntansi syariah, harus ada kontrol yang ketat untuk memastikan dana yang diterima digunakan dengan tepat, sesuai dengan kebutuhan yang relevan dan sesuai syariah.
4. **Pengaruh Terhadap Laporan Keuangan:** Dalam konteks *Flypaper Effect*, dana yang diterima seringkali tercatat dalam laporan keuangan tanpa mempertimbangkan apakah dana tersebut digunakan dengan efektif atau tidak. Di sisi lain, akuntansi syariah memastikan laporan keuangan mencerminkan pengelolaan dana yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, dan dana yang diterima harus dapat dipertanggungjawabkan dengan jelas.

Secara keseluruhan, *Flypaper Effect* dapat berpotensi menimbulkan masalah dalam pengelolaan dana di dalam organisasi, termasuk yang berlandaskan syariah. Oleh karena itu, akuntansi syariah berperan penting

untuk memastikan bahwa dana yang diterima dikelola dengan efisien dan sesuai dengan prinsip-prinsip Islam, menghindari pemborosan dan meningkatkan akuntabilitas.³²

C. Kerangka Berpikir



Sumber: Permendagri Nomor 113 Tahun 2014.

Gambar 2.1 : Bagan Kerangka Berfikir

³² Eny Latifah et al., “Dasar-Dasar Akuntansi Syariah,” 2022.

BAB III

METODE PENELITIAN

Metode penelitian digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif. Penelitian kualitatif adalah suatu pendekatan penelitian yang berfokus pada pemahaman mendalam dan interpretatif terhadap fenomena manusia beserta konteks sosial, budaya, dan psikologis di dalamnya. Pendekatan ini memandang manusia sebagai makhluk yang kompleks dan berupaya untuk memahami makna, pandangan, dan pengalaman yang mendasari tindakan dan interaksi mereka. Penelitian kualitatif mengutamakan kualitas data daripada kuantitas, dan metodenya melibatkan pengumpulan data dalam bentuk narasi, wawancara, observasi, atau dokumen, yang kemudian dianalisis secara mendalam untuk mengidentifikasi pola, tema, dan makna yang muncul. Tujuan utama penelitian kualitatif adalah menghasilkan wawasan yang mendalam, menjelaskan fenomena yang kompleks, serta mengembangkan teori atau konsep baru berdasarkan temuan penelitian.³³

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Pendekatan penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah Pendekatan Fenomenologi. Secara harfiah fenomena diartikan sebagai gejala atau sesuatu yang menampakkan. Fenomenologi adalah ilmu tentang esensi-esensi kesadaran dan esensi ideal dari obyek-obyek sebagai korelasi dengan kesadaran. Fenomenologi juga merupakan sebuah pendekatan filosofis untuk menyelidiki pengalaman manusia. Fenomenologi bermakna metode pemikiran untuk memperoleh ilmu pengetahuan baru atau mengembangkan pengetahuan

³³ Muhammad Rijal Fadli, "Memahami Desain Metode Penelitian Kualitatif," HUMANIKA 21, no. 1 (2021).

yang ada dengan langkah-langkah logis, sistematis kritis, tidak berdasarkan apriori/prasangka, dan tidak dogmatis.³⁴

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan. Penelitian lapangan (*fieldresearch*) ialah penelitian yang berproses dengan melihat secara lebih mendetail terkait suatu golongan sosial dengan cara-cara tertentu untuk mendapatkan deskripsi yang teratur dengan baik dan menyeluruh. Maka dari itu, peneliti sudah seharusnya melaksanakan penelitian secara langsung dengan pendekatan fenomenologis dan pendekatan teologis, dengan mengamati objek dalam penelitian, sehingga peneliti dapat mengadakan wawancara terhadap objek penelitian terkait untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian.³⁵

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Desa Kulo, Kecamatan Kulo, Kabupaten Sidrap. Adapun waktu penelitian yaitu peneliti akan melakukan penelitian dalam waktu $\pm$ 45 hari lamanya.

C. Fokus Penelitian

Penelitian ini dilakukan untuk menganalisis *flypapaer effect* berdasarkan pengolahan dana. Penelitian ini dilakukan untuk mendapatkan

³⁴ Parlaungan Gultom, *Pendekatan Fenomenologis Terhadap Teori Penciptaan* (PBM ANDI, 2021).

³⁵ V Wiratna Sujarweni, "Metodelogi Penelitian," *Yogyakarta: Pustaka Baru Perss*, 2014.

informasi terkait *flypapaer effect* berdasarkan pengolahan dan data Desa Kulo, Kec. Kulo, Kab. Sidrap. Penelitian ini akan berfokus pada *flypapaer effect*.

D. Jenis dan Sumber Data

1. Jenis Data

Jenis data yang dipakai dalam penelitian ini adalah data kualitatif atau data yang terdiri atas kata-kata atau deskriptif. Data kualitatif ini didapatkan dengan beragam teknik pengumpulan data yaitu wawancara, observasi, dan dokumentasi. Data dalam kemasan lain yaitu berupa pengambilan gambar, hasil rekaman suara maupun video.

2. Sumber Data

Sumber data yaitu segala uraian yang didapatkan dari orang lain ataupun dari berkas-berkas. Sumber data merujuk pada asal-usul informasi atau materi yang digunakan untuk menjawab pertanyaan penelitian dan mendukung analisis. Sumber data dibagi menjadi dua yaitu data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari objek penelitian melalui berbagai metode pengumpulan data, seperti wawancara, kuisioner, observasi, eksperimen, dan sebagainya. Sedangkan data sekunder adalah data yang sudah ada dan telah dikumpulkan oleh pihak untuk tujuan yang berbeda, namun dapat digunakan untuk penelitian yang sedang dilakukan, seperti buku, artikel jurnal, laporan penelitian dan sejenisnya.³⁶

E. Teknik Pengumpulan dan Pengelolaan Data

³⁶ Andika Saputra, *CAMI: Aplikasi Uji Validitas Dan Reliabilitas Instrumen Penelitian Berbasis Web* (Yayasan ahmar cendekia indonesia, 2020).

Teknik pengumpulan data ialah semua hal yang terkait dengan seperti apa atau dengan cara apa data dapat dikumpulkan. Adapun pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan tiga teknik, yakni wawancara, observasi dan dokumentasi. Penjelasan nya ialah sebagai berikut:

a. Observasi

Observasi ialah teknik mengamati mekanisme atau strategi yang terjadi dilapangan dan mencatat yang dilaksanakan secara teratur terhadap jual beli barter di kalangan masyarakat. Observasi dapat dilaksanakan secara langsung, karena yang diperlukan ialah sikap teliti dan cermat. Dalam cara praktik observasi, terdapat beberapa komponen penting, contohnya catatan yang termuat dan alat-alat yang mampu merekam, *recorder tape*, kamera, dan lainnya selaras dengan keperluan.³⁷

b. Wawancara

Wawancara adalah percakapan disebut proses mengumpulkan data dengan cara memberikan beberapa pertanyaan secara *direct* kepada pihak responden yaitu masyarakat di Kulo, Kecamatan Kulo, Kabupaten Sidrap yang dilakukan oleh peneliti dan jawaban- jawaban yang dating dari responden dituliskan atau didokumentasi dengan alat perekam. Teknik wawancara bertujuan untuk mengumpulkan keterangan dari lisan masyarakat responden.³⁸

F. Uji Keabsahan Data

³⁷ SPMS Ni'matuzahroh and Susanti Prasetyaningrum, *Observasi: Teori Dan Aplikasi Dalam Psikologi*, vol. 1 (UMMPress, 2018).

³⁸ R A Fadhallah, *Wawancara* (Unj Press, 2021).

Uji keabsahan data adalah data yang tidak berbeda antara informasi yang diperoleh peneliti dengan yang terjadi sesungguhnya di lapangan.³⁹ Tahap ini digunakan untuk menyanggah balik segala argumen yang mengatakan bahwa hasil akhir data tidak ilmiah. Maka perlu dilaksanakan uji keabsahan untuk membuktikan apakah penelitian yang dilakukan benar-benar merupakan hasil penelitian yang andal serta dapat dipercaya. Adapun uji keabsahan data pada penelitian kualitatif terdiri atas *creadibility*, *transferability*, *dependability*, dan terakhir *confirmability*. Namun yang akan digunakan kali ini adalah uji kredibilitas.

Credibility atau kredibilitas adalah sejauh mana seseorang, organisasi, atau informasi dianggap dapat dipercaya atau memiliki keandalan. Dalam konteks komunikasi dan hubungan interpersonal, kredibilitas biasanya mengacu pada sejauh mana orang atau sumber dianggap jujur, berpengetahuan, dan kompeten. Kredibilitas sangat penting dalam berbagai aspek, seperti di media, politik, pemasaran, serta dalam hubungan profesional dan personal.⁴⁰

Transferability adalah konsep yang merujuk pada sejauh mana temuan, hasil, atau informasi dari suatu penelitian atau pengalaman dapat diterapkan atau digunakan dalam konteks atau situasi lain yang berbeda. Dalam konteks penelitian, terutama dalam penelitian kualitatif, *transferability* mengacu pada

³⁹ Tim Penyusun, “Pedoman Penulisan Karya Ilmiah IAIN Parepare Tahun 2020” (IAIN Parepare Nusantara Press, 2020).

⁴⁰ Munir Fuady, *Hukum Bisnis Dalam Teori Praktek Buku Kedua* (PT Citra Aditya Bakti, 2018).

kemampuan hasil penelitian untuk dapat dipindahkan atau diterapkan ke dalam situasi atau populasi lain yang memiliki kesamaan atau relevansi.⁴¹

Dependability dalam konteks penelitian, khususnya penelitian kualitatif, merujuk pada sejauh mana hasil atau temuan penelitian dapat dipercaya dan konsisten jika penelitian tersebut diulang dalam kondisi yang serupa. *Dependability* berfokus pada kestabilan dan keandalan proses penelitian dari waktu ke waktu. Ini berkaitan dengan kemampuan untuk mempertahankan kualitas dan konsistensi dalam pelaksanaan penelitian serta bagaimana peneliti dapat menjelaskan dan mendokumentasikan keputusan yang diambil selama proses penelitian.⁴²

Confirmability dalam konteks penelitian, khususnya penelitian kualitatif, merujuk pada sejauh mana temuan atau hasil penelitian dapat dibuktikan atau dikonfirmasi oleh orang lain. *Confirmability* memastikan bahwa hasil penelitian didasarkan pada data yang objektif, bukan hanya pada pandangan atau bias peneliti. Ini berfokus pada kemampuan untuk membuktikan bahwa hasil penelitian mencerminkan kenyataan atau pengalaman yang diteliti, dan bukan interpretasi subjektif dari peneliti.⁴³

⁴¹ Kholis Roisah, "KEBIJAKAN HUKUM 'TRANSFERABILITY' TERHADAP PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL DI INDONESIA," *LAW REFORM* 11, no. 2 (2015).

⁴² Munir Fuady, *Hukum Bisnis Dalam Teori Praktek Buku Kedua* (PT Citra Aditya Bakti, 2018).

⁴³ Suyanto, *Peran Kepala Madrasah Dalam Meningkatkan Kinerja Gruu (Studi Kasus Di Madrasah Tsanawiyah Negeri Tumpang Kabupaten Malang)*, Tesis, vol. 6, 2014.

Uji kredibilitas data terhadap hasil penelitian kualitatif yaitu dilakukan dengan perpanjangan pengamatan, peningkatan ketekunan dalam penelitian, dan triangulasi. Triangulasi diartikan sebagai teknik pengumpulan data yang bersifat menggabungkan berbagai sumber informasi yang telah ada. Bila peneliti melakukan pengumpulan data secara triangulasi, berarti sekaligus telah menguji kredibilitas data. Triangulasi yang digunakan adalah triangulasi sumber, yakni membandingkan atau mengecek kembali derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh dari berbagai sumber. Teknik tersebut dapat dilakukan sebagaimana berikut:

1. Mengecek kesesuaian data hasil pengamatan dengan hasil wawancara;
2. Membandingkan keadaan dan perspektif individu dengan pendapat orang lain;
3. Membandingkan hasil wawancara dengan isi dokumen yang terkait.⁴⁴

G. Teknik Analisis Data

Analisis data ialah tahapan selanjutnya yang dikerjakan peneliti untuk mencari, melakukan penataan, serta menyusun kesimpulan secara teratur dari pengumpulan data yang dilakukan oleh peneliti. Teknik analisis data yang akan digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini ialah teknik analisis data model interaktif yang mana dijelaskan oleh Miles dan Huberman. Tahapan dalam analisis data ini terdiri atas reduksi data, penyajian data, serta verifikasi dan pemberian kesimpulan. Teknik analisis data model interaktif menekankan pada proses menyederhanakan data ke dalam ruang lingkup yang lebih mudah

⁴⁴ M.Pd Subakti, Hani, S.Pd. and MPH Priskusanti, Retno dewi, S.ST., *Riset Kualitatif Dan Kuantitatif Dalam Bidang Kesehatan, Media Sains Indonesia*, 2021.

dipahami.⁴⁵ Dalam penelitian ini, analisis data dibuat dengan mengacu pada teknik analisis data model interaktif oleh Miles dan Hubberman yang dibagi atas tiga tahapan yang harus dilakukannya itu:

1. Reduksi Data

Reduksi data dapat didefinisikan sebagai membuat rangkuman, menyederhanakan, dan memilah hal-hal penting, kemudian berfokus pada hal-hal yang penting tersebut untuk kemudian dirumuskan tema dan polanya. Reduksi data ialah analisis yang berorientasi serta mengelompokkan data dengan cara yang telah dirumuskan, sehingga dapat dibuat kesimpulan akhir atau melalui tahapan verifikasi. Data yang didapatkan dari lapangan, langsung dituliskan dengan jelas setiap pengumpulan data selesai dilakukan. Adanya reduksi data akan memudahkan peneliti untuk memilah hal-hal pokok serta membantu mencari kembali data yang diperlukan dengan memberi tanda pada aspek-aspek tertentu.⁴⁶

2. Penyajian Data

Penyajian data ialah proses menyusun data yang telah dikumpulkan yang membuka probabilitas ditariknya kesimpulan atau mengambil tindakan. Miles & Huberman memberi batasan, bahwa penyajian data sebagai rangkaian susunan informasi yang menyediakan probabilitas

⁴⁵ M Jogiyanto Hartono, *Metoda Pengumpulan Dan Teknik Analisis Data* (Penerbit Andi, 2018).

⁴⁶ M Riasnugrahani and P Analya, *Buku Ajar: Metode Penelitian Kualitatif* (Ideas Publishing, 2023).

adanya upaya menarik kesimpulan dan penetapan tindakan. Hal ini memudahkan peneliti untuk memahami dan menguasai data secara menyeluruh serta untuk merumuskan tahapan berikutnya.

3. Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan ialah tahapan dari suatu aktivitas atas deskripsi yang lengkap. Hasil dari upaya menarik kesimpulan juga diverifikasi selama penelitian diadakan. Hasil-hasil yang timbul dari data seharusnya di uji kebenaran dan ketetapan validitasnya terpercaya. Dalam bagian ini, peneliti merumuskan sebuah rumusan proposisi, untuk selanjutnya dikerjakan dengan menganalisis secara berkelanjutan terkait data yang telah terhimpun. Proses berikutnya ialah membuat laporan hasil penelitian yang mendetail dengan hasil penelitian baru yang berbeda dari penelitian yang ada.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. HASIL PENELITIAN

1. Pemahaman pemerintah desa Kulo mengenai "*Flypaper Effect*"

Flypaper Effect adalah fenomena ekonomi di mana dana atau sumber daya yang diterima oleh pemerintah atau organisasi cenderung tetap berada di tempat penerimanya, meskipun sumber daya tersebut seharusnya dialokasikan atau disebarkan ke tujuan lain.

Uraian lebih jelas mengenai bentuk pemahaman pemerintah desa kulo di Kecamatan Kulo Kabupaten Sidrap, penulis menguraikan hasil wawancara dari salah satu responden sebagai sumber data yang akurat, dan pertanyaan di atas lebih dipertegas oleh informan atas nama Haryanto, sebagai kepala desa di Desa Kulo, Kecamatan Kulo, Kabupaten Sidenreng Rappang.

"Saya tidak tau yang dinamakan *Flypaper Effect*, maknanya saya tadi bertanya apa yang dimaksud, nah setelah didefinisikan ternyata saya paham ji, baiknya kalau anak-anak dari kampus itu penelitian begini ke desa-desa bagus jika tidak menggunakan istilah yang terlalu rumit."⁴⁷

Berdasarkan pernyataan tersebut, dapat disimpulkan bahwa pemahaman terhadap konsep-konsep yang lebih teknis seperti "*Flypaper Effect*" masih terbatas di kalangan masyarakat desa. Meskipun ada upaya

⁴⁷ Haryanto, Kepala Desa Kulo, *Wawancara*, (Kulo, 06 Desember 2024. Pukul 09.00).

untuk memahami istilah tersebut setelah penjelasan diberikan, responden mengungkapkan bahwa istilah yang terlalu rumit dapat membingungkan bagi orang-orang yang tidak familiar dengan istilah akademik tersebut. Oleh karena itu, penting bagi para peneliti atau pihak yang melakukan penelitian di desa untuk menggunakan bahasa yang lebih sederhana dan mudah dipahami, agar informasi yang disampaikan bisa diterima dengan baik oleh masyarakat desa. Pendekatan komunikasi yang lebih inklusif dan jelas akan meningkatkan pemahaman dan partisipasi aktif masyarakat dalam proses penelitian dan pembangunan desa.

2. Proses Perencanaan Pengelolaan Dana Desa di Desa Kulo

Perencanaan pengelolaan dana desa merupakan langkah awal yang krusial dalam memastikan penggunaan dana desa dapat tepat sasaran dan efektif. Melalui proses perencanaan yang melibatkan partisipasi masyarakat, dana desa dialokasikan untuk mendukung pembangunan infrastruktur, pemberdayaan masyarakat, dan peningkatan kesejahteraan desa. Perencanaan yang matang akan memastikan transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi dalam pengelolaan dana, serta memberikan manfaat yang maksimal bagi seluruh warga desa.

Uraian lebih jelas mengenai bentuk perencanaan pengelolaan dana di desa kulo di Kecamatan Kulo Kabupaten Sidrap, penulis menguraikan hasil wawancara dari salah satu responden sebagai sumber data yang akurat, dan pertanyaan di atas lebih dipertegas oleh informan atas nama Haryanto, sebagai kepala desa di Desa Kulo, Kecamatan Kulo, Kabupaten Sidenreng Rappang.

"Proses perencanaan pengelolaan dana desa di Desa Kulo dimulai dengan musyawarah desa yang melibatkan perangkat desa, tokoh masyarakat, dan BPD untuk mendiskusikan prioritas pembangunan. Kami menyusun rencana anggaran yang mencakup program pembangunan infrastruktur dan pemberdayaan masyarakat, berdasarkan RPJMDes. Setiap tahunnya, perencanaan ini dievaluasi dan disesuaikan agar dana desa dapat digunakan secara efektif dan memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat."⁴⁸

Berdasarkan pernyataan Kepala Desa Kulo, dapat disimpulkan bahwa proses perencanaan pengelolaan dana desa di Desa Kulo dimulai dengan melibatkan berbagai pihak melalui musyawarah desa. Dalam forum ini, perangkat desa, tokoh masyarakat, dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) bersama-sama mendiskusikan prioritas pembangunan yang perlu dilakukan di desa. Musyawarah ini menjadi dasar bagi penyusunan rencana anggaran yang akan digunakan untuk berbagai program pembangunan, termasuk infrastruktur dan pemberdayaan masyarakat.

Selain itu, Kepala Desa Kulo menjelaskan bahwa perencanaan anggaran desa selalu merujuk pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes), yang menjadi acuan untuk memastikan bahwa dana desa digunakan secara tepat sasaran. Setiap tahunnya, proses perencanaan ini tidak hanya dilakukan sekali, tetapi juga dievaluasi dan disesuaikan agar anggaran yang ada dapat dimanfaatkan dengan lebih efektif dan memberikan manfaat maksimal bagi seluruh masyarakat desa.

⁴⁸ Haryanto, Kepala Desa Kulo, *Wawancara*, (Kulo, 06 Desember 2024. Pukul 09.00).

Dengan adanya evaluasi tahunan terhadap perencanaan penggunaan dana desa, Desa Kulo berupaya memastikan bahwa alokasi dana tetap relevan dengan kebutuhan yang ada dan dapat dioptimalkan. Hal ini mencerminkan komitmen pemerintah desa untuk menjadikan pengelolaan dana desa lebih responsif terhadap perubahan kebutuhan masyarakat dan perkembangan desa.

3. Pertimbangan Utama dalam Menentukan Alokasi Anggaran untuk Program atau Kegiatan di Desa.

Dalam menentukan alokasi anggaran untuk program atau kegiatan di desa, beberapa pertimbangan utama perlu diperhatikan, seperti prioritas kebutuhan masyarakat, kesesuaian dengan RPJMDes, ketersediaan dana, dan dampak terhadap kesejahteraan masyarakat. Semua ini bertujuan agar anggaran desa digunakan secara efektif, efisien, dan tepat sasaran demi kemajuan pembangunan desa.

Uraian lebih jelas mengenai bentuk pertimbangan pengalokasian dana desa di desa Kulo Kecamatan Kulo Kabupaten Sidrap, penulis menguraikan hasil wawancara dari salah satu responden sebagai sumber data yang akurat, dan pertanyaan di atas lebih dipertegas oleh informan atas nama Haryanto, sebagai kepala desa di Desa Kulo, Kecamatan Kulo, Kabupaten Sidenreng Rappang.

“Yang menjadi pertimbangan kami selaku aparat desa dalam menentukan alokasi anggaran itu kita lihat dulu apa yang kemudian menjadi kebutuhan di desa kita. Walaupun semisalnya kami

menetapkan anggaran untuk program desa, itu pasti kami pertimbangkan dampaknya pada desa.”⁴⁹

Berdasarkan pernyataan Kepala Desa Kulo, dapat disimpulkan bahwa dalam menentukan alokasi anggaran dana desa, pemerintah desa selalu mengutamakan pendekatan berbasis kebutuhan masyarakat. Sebelum menetapkan anggaran untuk program-program desa, pihak desa terlebih dahulu melakukan penilaian terhadap apa saja yang benar-benar dibutuhkan oleh masyarakat. Pendekatan ini memastikan bahwa penggunaan dana desa benar-benar relevan dan bermanfaat bagi warga desa.

Selain itu, Kepala Desa Kulo juga menekankan pentingnya mempertimbangkan dampak dari setiap program yang akan dilaksanakan. Setiap keputusan anggaran tidak hanya didasarkan pada kebutuhan saat ini, tetapi juga mempertimbangkan bagaimana program tersebut dapat memberikan manfaat jangka panjang bagi pembangunan desa. Dengan mempertimbangkan dampak yang akan ditimbulkan, pemerintah desa berusaha memastikan bahwa setiap alokasi anggaran dapat memberikan kontribusi maksimal bagi kesejahteraan dan kemajuan desa.

Secara keseluruhan, pernyataan Kepala Desa Kulo menggambarkan komitmen pemerintah desa untuk mengelola dana desa secara bijaksana, dengan selalu mengutamakan kebutuhan masyarakat dan dampak positif dari setiap program yang dijalankan. Hal ini

⁴⁹ Haryanto, Kepala Desa Kulo, *Wawancara*, (Kulo, 06 Desember 2024. Pukul 09.00).

menunjukkan bahwa pengelolaan dana desa di Desa Kulo dilakukan secara hati-hati dan penuh pertimbangan, demi mencapai hasil yang optimal untuk kemajuan desa.

4. Mekanisme Pengelolaan Dana Desa yang Efisien dan Efektif

Pengelolaan dana desa yang efisien dan efektif sangat penting untuk memastikan bahwa setiap alokasi anggaran dapat memberikan dampak positif bagi pembangunan desa. Melalui perencanaan yang matang, pengawasan yang ketat, dan pelaporan yang transparan, diharapkan pengelolaan dana desa dapat berjalan secara optimal dan memberikan manfaat maksimal bagi kemajuan desa.

Uraian lebih jelas mengenai mekanisme pengelolaan dana yang efektif dan efisien pengalokasian dana desa di desa Kulo Kecamatan Kulo Kabupaten Sidrap, penulis menguraikan hasil wawancara dari salah satu responden sebagai sumber data yang akurat, dan pertanyaan di atas lebih dipertegas oleh informan atas nama Haryanto, sebagai kepala desa di Desa Kulo, Kecamatan Kulo, Kabupaten Sidenreng Rappang.

“Saya memastikan dana desa dikelola dengan transparan dan tepat sasaran melalui perencanaan yang matang dan melibatkan masyarakat. Setiap pengeluaran diawasi dengan ketat oleh aparat desa dan dilaporkan secara terbuka kepada warga. Kami juga rutin mengevaluasi penggunaan dana untuk memastikan bahwa dana tersebut digunakan secara efisien sesuai prioritas pembangunan yang telah disepakati bersama.”⁵⁰

⁵⁰ Haryanto, Kepala Desa Kulo, *Wawancara*, (Kulo, 06 Desember 2024. Pukul 09.00).

Berdasarkan pernyataan Kepala Desa Kulo, dapat disimpulkan bahwa pemerintah desa sangat menekankan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa. Kepala desa memastikan bahwa setiap tahap pengelolaan dana dimulai dengan perencanaan yang matang, yang melibatkan partisipasi masyarakat. Pendekatan ini bertujuan untuk memastikan bahwa dana desa digunakan untuk program-program yang tepat sasaran dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Selain itu, setiap pengeluaran dana desa diawasi secara ketat oleh aparat desa, yang juga memastikan bahwa laporan penggunaan dana disampaikan secara terbuka kepada masyarakat. Transparansi ini memberikan ruang bagi warga untuk mengawasi dan mengevaluasi penggunaan dana desa, sehingga pengelolaan keuangan desa dapat berjalan dengan akuntabel. Dengan adanya sistem pengawasan yang jelas, kepala desa berharap dapat mencegah penyalahgunaan dana dan memastikan dana digunakan untuk kepentingan bersama.

Kepala Desa Kulo juga menambahkan bahwa evaluasi rutin dilakukan untuk menilai sejauh mana penggunaan dana desa berjalan dengan efisien dan efektif. Evaluasi ini memungkinkan pemerintah desa untuk memastikan bahwa dana desa digunakan sesuai dengan prioritas pembangunan yang telah disepakati bersama dalam musyawarah desa. Melalui evaluasi yang berkelanjutan, diharapkan pengelolaan dana desa dapat terus diperbaiki dan memberikan manfaat maksimal bagi kemajuan desa.

5. Mekanisme Pelaporan Penggunaan Dana Desa di Desa Kulo

Pelaporan yang transparan dan akuntabel merupakan bagian penting dalam pengelolaan dana desa. Di Desa Kulo, mekanisme pelaporan penggunaan dana desa dilakukan secara terbuka untuk memastikan bahwa setiap alokasi anggaran dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat. Dalam sub bab ini, akan dibahas tentang prosedur pelaporan yang diterapkan di Desa Kulo, termasuk cara informasi disampaikan kepada masyarakat serta upaya untuk menjaga kepercayaan dan partisipasi aktif warga dalam pengawasan dana desa.

Uraian lebih jelas mengenai mekanisme pelaporan penggunaan dana desa di desa Kulo Kecamatan Kulo Kabupaten Sidrap, penulis menguraikan hasil wawancara dari salah satu responden sebagai sumber data yang akurat, dan pertanyaan di atas lebih dipertegas oleh informan atas nama Haryanto, sebagai kepala desa di Desa Kulo, Kecamatan Kulo, Kabupaten Sidenreng Rappang.

“Di Desa Kulo, pelaporan penggunaan dana desa dilakukan secara terbuka dan transparan. Setiap tahapan penggunaan dana dilaporkan melalui rapat desa yang dihadiri oleh warga dan perangkat desa. Kami juga menyusun laporan tertulis yang mencakup rincian pengeluaran dan dipasang di papan pengumuman desa agar dapat diakses oleh semua masyarakat, seperti yang ada di depan sana. Selain itu, laporan tersebut juga disampaikan kepada Badan Permusyawaratan Desa (BPD) untuk mendapatkan evaluasi dan masukan. Dengan mekanisme ini, kami berharap dapat menjaga akuntabilitas dan mendorong

partisipasi aktif dari masyarakat dalam pengawasan penggunaan dana desa."⁵¹

Berdasarkan pernyataan Kepala Desa Kulo, dapat disimpulkan bahwa pelaporan penggunaan dana desa di Desa Kulo dilakukan dengan sangat terbuka dan transparan. Setiap tahapan penggunaan dana desa dilaporkan melalui rapat desa yang dihadiri oleh warga dan perangkat desa, memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk mengetahui secara langsung bagaimana dana desa digunakan. Pendekatan ini memastikan bahwa informasi terkait penggunaan dana desa tersedia bagi seluruh pihak yang berkepentingan.

Selain itu, pemerintah desa juga menyusun laporan tertulis yang mencakup rincian pengeluaran dana desa dan memasangnya di papan pengumuman desa. Langkah ini memastikan bahwa laporan tersebut dapat diakses dengan mudah oleh seluruh masyarakat, sehingga mereka dapat memantau penggunaan dana desa secara langsung. Hal ini mencerminkan komitmen desa untuk menjaga transparansi dalam setiap aspek pengelolaan dana desa.

Kepala Desa Kulo juga menjelaskan bahwa laporan penggunaan dana desa tidak hanya disampaikan kepada masyarakat, tetapi juga diserahkan kepada Badan Permusyawaratan Desa (BPD) untuk mendapatkan evaluasi dan masukan. Dengan mekanisme ini, pemerintah

⁵¹ Haryanto, Kepala Desa Kulo, *Wawancara*, (Kulo, 06 Desember 2024. Pukul 09.00).

desa berharap dapat meningkatkan akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa serta mendorong partisipasi aktif dari masyarakat dalam mengawasi penggunaan dana. Melalui keterlibatan masyarakat dan evaluasi yang berkelanjutan, diharapkan pengelolaan dana desa dapat berjalan lebih efektif dan tepat sasaran.

6. Tantangan dan Kendala dalam Pertanggungjawaban Penggunaan Dana Desa kepada Masyarakat

Pertanggungjawaban penggunaan dana desa kepada masyarakat merupakan bagian penting dari upaya menjaga transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan desa. Namun, dalam praktiknya, seringkali terdapat tantangan dan kendala yang dihadapi oleh pemerintah desa, baik dari segi pemahaman masyarakat, keterbatasan sumber daya, maupun kompleksitas administrasi yang harus dipenuhi. Pada sub bab ini, akan dibahas mengenai berbagai tantangan yang muncul dalam proses pertanggungjawaban dan langkah-langkah yang diambil untuk mengatasinya, dengan tujuan untuk meningkatkan partisipasi dan kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan dana desa.

Uraian lebih jelas mengenai tantangan dan kendaladalam pertanggungjawaban dana desa di desa Kulo Kecamatan Kulo Kabupaten Sidrap, penulis menguraikan hasil wawancara dari salah satu responden sebagai sumber data yang akurat, dan pertanyaan di atas lebih dipertegas oleh informan atas nama Haryanto, sebagai kepala desa di Desa Kulo, Kecamatan Kulo, Kabupaten Sidenreng Rappang.

“Tentu saja, dalam menjalankan pertanggungjawaban penggunaan dana desa, kami menghadapi beberapa tantangan. Salah satunya adalah masih ada sebagian masyarakat yang belum sepenuhnya memahami rincian anggaran dan penggunaan dana desa, sehingga kadang muncul kebingungan atau ketidakpahaman. Untuk mengatasi ini, kami berupaya untuk lebih sering melakukan sosialisasi dan rapat desa, serta menyajikan laporan yang lebih mudah dipahami. Namun, kami selalu berkomitmen untuk menjaga transparansi dan akuntabilitas agar masyarakat bisa merasa tenang dan percaya terhadap pengelolaan dana desa.”⁵²

Berdasarkan pernyataan Kepala Desa Kulo, dapat disimpulkan bahwa dalam menjalankan pertanggungjawaban penggunaan dana desa, pemerintah desa menghadapi beberapa tantangan, salah satunya adalah kurangnya pemahaman sebagian masyarakat terhadap rincian anggaran dan penggunaan dana desa. Hal ini sering menimbulkan kebingungan atau ketidakpahaman di kalangan warga desa terkait dengan alokasi dan penggunaan dana desa.

Untuk mengatasi tantangan tersebut, pemerintah desa berkomitmen untuk lebih sering melakukan sosialisasi dan mengadakan rapat desa yang melibatkan masyarakat secara langsung. Selain itu, laporan penggunaan dana desa juga disajikan dalam format yang lebih mudah dipahami, agar masyarakat dapat lebih mudah memahami bagaimana dana desa digunakan dan diawasi. Dengan langkah-langkah ini, pemerintah desa berharap dapat mengurangi ketidakpahaman dan meningkatkan partisipasi aktif warga dalam pengelolaan dana desa.

⁵² Haryanto, Kepala Desa Kulo, *Wawancara*, (Kulo, 06 Desember 2024. Pukul 09.00).

Meski menghadapi tantangan, Kepala Desa Kulo menegaskan komitmennya untuk menjaga transparansi dan akuntabilitas dalam setiap proses pengelolaan dana desa. Dengan pendekatan yang terbuka dan melibatkan masyarakat, diharapkan warga dapat merasa lebih tenang dan percaya terhadap pengelolaan dana desa, serta terus berperan aktif dalam pengawasan dan pengambilan keputusan terkait penggunaan dana desa.

7. Proses Pengelolaan Keuangan Dana Desa dari Penerimaan hingga Pengeluaran

Pengelolaan keuangan desa adalah suatu proses yang melibatkan perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pertanggungjawaban penggunaan dana yang dimiliki oleh desa. Tujuan dari pengelolaan ini adalah untuk mendukung pembangunan dan kesejahteraan masyarakat desa secara efektif, transparan, dan akuntabel.

Uraian lebih jelas tentang proses pengelolaan dana desa di desa Kulo Kecamatan Kulo Kabupaten Sidrap, penulis menguraikan hasil wawancara dari salah satu responden sebagai sumber data yang akurat, dan pertanyaan di atas lebih dipertegas oleh informan atas nama Erna, sebagai Kaur Keuangan Desa atau bendahara desa di Desa Kulo, Kecamatan Kulo, Kabupaten Sidenreng Rappang.

“Samaji dengan pengelolaan dana desa pada umumnya, yakni perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, dan kemudian pertanggungjawaban.”⁵³

⁵³ Erna, KAUR Keuangan Desa Kulo, *Wawancara*, (Kulo, 06 Desember 2024. Pukul 10.00).

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan Kaur Keuangan Desa atau bendahara desa di Desa Kulo, proses pengelolaan dana desa di desa ini mengikuti prosedur yang sama dengan pengelolaan dana desa pada umumnya. Proses tersebut dimulai dengan tahap perencanaan, di mana pemerintah desa menyusun Rencana Kerja Anggaran Desa (RKAPDes) yang mencakup berbagai prioritas pembangunan yang selaras dengan kebutuhan masyarakat desa. Tahap ini melibatkan partisipasi aktif dari masyarakat, untuk memastikan bahwa anggaran yang tersedia dapat digunakan secara maksimal untuk kepentingan bersama. Setelah perencanaan, tahap berikutnya adalah pelaksanaan, di mana pemerintah desa mulai melaksanakan program-program yang telah disetujui, dengan melibatkan masyarakat dan perangkat desa dalam setiap kegiatan. Setelah pelaksanaan, tahap pelaporan dilakukan untuk memberikan transparansi kepada pemerintah kabupaten/kota serta masyarakat terkait penggunaan dana desa, guna memastikan bahwa setiap kegiatan yang dilaksanakan sesuai dengan rencana dan anggaran yang ditetapkan. Terakhir, tahap pertanggungjawaban dilakukan dengan mempertanggungjawabkan penggunaan dana kepada masyarakat desa dan pemerintah, yang mencakup laporan keuangan serta evaluasi terhadap hasil yang dicapai. Dengan mengikuti tahapan ini, pengelolaan dana desa di Desa Kulo diharapkan dapat berjalan efektif dan memberikan manfaat yang optimal bagi pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.

8. Peran Teknologi dalam Membantu Proses Penatausahaan Dana

Desa

Pemanfaatan teknologi dalam pengelolaan dana desa semakin penting untuk meningkatkan efisiensi, akurasi, dan transparansi. Dengan menggunakan berbagai aplikasi dan sistem digital, proses penatausahaan dana desa dapat dilakukan dengan lebih cepat dan lebih terstruktur, sekaligus memudahkan pencatatan serta pelaporan keuangan. Pada sub bab ini, akan dibahas mengenai sejauh mana teknologi berperan dalam mendukung pengelolaan dana desa di Desa Kulo, serta manfaat yang diperoleh dalam hal akuntabilitas dan transparansi pengelolaan anggaran desa.

Uraian lebih jelas tentang peran teknologi dalam membantu proses penatausahaan dana desa di desa Kulo Kecamatan Kulo Kabupaten Sidrap, penulis menguraikan hasil wawancara dari salah satu responden sebagai sumber data yang akurat, dan pertanyaan di atas lebih dipertegas oleh informan atas nama Erna, sebagai Kaur Keuangan Desa atau bendahara desa di Desa Kulo, Kecamatan Kulo, Kabupaten Sidenreng Rappang.

“Seiring dengan perkembangan teknologi, kami di Desa Kulo mulai memanfaatkan berbagai aplikasi dan sistem digital untuk mendukung penatausahaan dana desa. Kami menggunakan software akuntansi untuk mencatat semua transaksi secara otomatis, yang membantu mempercepat proses pencatatan dan meminimalkan kesalahan manusia. Selain itu, laporan keuangan juga dibuat dalam format digital, yang memudahkan untuk dibagikan kepada perangkat desa dan masyarakat. Teknologi ini juga memudahkan kami dalam memonitor anggaran dan memastikan bahwa semua pengeluaran tercatat dengan rapi dan

transparan. Dengan dukungan teknologi, kami berharap pengelolaan dana desa bisa lebih efisien dan akuntabel.”⁵⁴

Berdasarkan pernyataan Bendahara Desa Kulo, dapat disimpulkan bahwa pemanfaatan teknologi dalam pengelolaan dana desa di Desa Kulo telah memberikan kontribusi yang signifikan. Dengan menggunakan aplikasi dan sistem digital, seperti software akuntansi, proses pencatatan transaksi keuangan menjadi lebih cepat, akurat, dan efisien. Hal ini membantu meminimalkan kesalahan manusia, yang sering terjadi dalam proses pencatatan manual, dan memastikan bahwa data keuangan desa tercatat dengan lebih baik.

Selain itu, laporan keuangan yang dibuat dalam format digital memudahkan perangkat desa dan masyarakat untuk mengakses dan memonitor penggunaan dana desa. Teknologi ini juga memberikan kemudahan dalam membagikan laporan secara cepat dan transparan, sehingga meningkatkan akuntabilitas pengelolaan dana desa kepada seluruh pihak yang berkepentingan. Dengan demikian, masyarakat dapat lebih mudah mengawasi dan memahami aliran dana desa.

Dengan dukungan teknologi, Bendahara Desa Kulo berharap pengelolaan dana desa dapat menjadi lebih efisien dan akuntabel. Teknologi tidak hanya membantu dalam mempercepat proses administrasi, tetapi juga memastikan bahwa anggaran desa dikelola

⁵⁴ Erna, KAUR Keuangan Desa Kulo, *Wawancara*, (Kulo, 06 Desember 2024. Pukul 10.00).

dengan lebih transparan dan terstruktur. Hal ini menunjukkan komitmen pemerintah desa untuk terus meningkatkan kualitas pengelolaan dana desa melalui pemanfaatan teknologi yang semakin berkembang.

9. Kendala Utama dalam Pengelolaan Dana Desa di Desa Kulo dan Upaya Mengatasinya

Pengelolaan dana desa tidak terlepas dari berbagai tantangan yang harus dihadapi oleh pemerintah desa. Setiap desa memiliki kondisi unik yang mempengaruhi cara dana dikelola, baik dari segi sumber daya manusia, pemahaman masyarakat, maupun sistem administrasi. Pada sub bab ini, akan dibahas mengenai kendala utama yang dihadapi oleh Desa Kulo dalam pengelolaan dana desa, serta langkah-langkah yang diambil untuk mengatasi tantangan tersebut, demi tercapainya pengelolaan yang lebih efektif, transparan, dan akuntabel.

Uraian lebih jelas tentang peran teknologi dalam membantu proses penatausahaan dana desa di desa Kulo Kecamatan Kulo Kabupaten Sidrap, penulis menguraikan hasil wawancara dari salah satu responden sebagai sumber data yang akurat, dan pertanyaan di atas lebih dipertegas oleh informan atas nama Erna, sebagai Kaur Keuangan Desa atau bendahara desa di Desa Kulo, Kecamatan Kulo, Kabupaten Sidenreng Rappang.

"Kendala utama yang kami hadapi dalam pengelolaan dana desa di Desa Kulo adalah terbatasnya sumber daya manusia yang memahami secara mendalam tentang administrasi keuangan dan peraturan yang berlaku. Banyak warga desa yang kurang familiar dengan prosedur dan regulasi yang harus dipatuhi dalam

pengelolaan dana desa. Untuk mengatasi hal ini, kami rutin mengadakan pelatihan dan bimbingan kepada aparat desa dan pengelola keuangan, baik secara internal maupun melalui pelatihan dari pihak luar seperti instansi pemerintah atau lembaga terkait. Selain itu, kami juga memanfaatkan teknologi untuk mempermudah pencatatan dan pengawasan agar pengelolaan dana lebih transparan dan akuntabel."⁵⁵

Berdasarkan pernyataan Bendahara Desa Kulo, dapat disimpulkan bahwa kendala utama dalam pengelolaan dana desa di Desa Kulo adalah terbatasnya sumber daya manusia yang memahami secara mendalam mengenai administrasi keuangan dan peraturan yang berlaku.

Untuk mengatasi kendala tersebut, pemerintah desa secara rutin mengadakan pelatihan dan bimbingan kepada aparat desa dan pengelola keuangan, baik secara internal maupun melalui pelatihan dari instansi pemerintah atau lembaga terkait. Langkah ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan keterampilan dalam mengelola dana desa secara profesional dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dengan pelatihan ini, diharapkan aparat desa dapat lebih memahami cara-cara yang tepat dalam menyusun laporan keuangan dan melaksanakan tugas mereka dengan lebih efisien.

Selain itu, Bendahara Desa Kulo juga menekankan pentingnya pemanfaatan teknologi untuk mempermudah pencatatan dan pengawasan dana desa. Teknologi ini memungkinkan proses pencatatan transaksi

⁵⁵ Erna, KAUR Keuangan Desa Kulo, *Wawancara*, (Kulo, 06 Desember 2024. Pukul 10.00).

menjadi lebih terstruktur dan meminimalkan potensi kesalahan. Dengan dukungan teknologi, pengelolaan dana desa menjadi lebih transparan dan akuntabel, memudahkan semua pihak untuk mengawasi penggunaan dana desa dan memastikan bahwa dana tersebut digunakan sesuai dengan kebutuhan dan prioritas pembangunan yang telah disepakati.

10. Mekanisme Pertanggungjawaban Terhadap Penggunaan Dana Desa yang Telah Dikelola

Pertanggungjawaban terhadap penggunaan dana desa merupakan salah satu aspek penting dalam menjaga transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa. Mekanisme pertanggungjawaban yang jelas dan terstruktur diperlukan untuk memastikan bahwa dana yang dikelola benar-benar digunakan sesuai dengan tujuan dan prioritas pembangunan yang telah disepakati bersama. Pada sub bab ini, akan dibahas mengenai bagaimana pemerintah desa mengelola proses pertanggungjawaban, mulai dari pelaporan pengeluaran hingga evaluasi yang melibatkan masyarakat dan lembaga terkait, guna memastikan penggunaan dana desa dilakukan dengan transparan dan efisien.

Uraian lebih jelas tentang Mekanisme pertanggungjawaban terhadap penggunaan dana desa yang telah dikelola di desa Kulo Kecamatan Kulo Kabupaten Sidrap, penulis menguraikan hasil wawancara dari salah satu responden sebagai sumber data yang akurat, dan pertanyaan di atas lebih dipertegas oleh informan atas nama Erna, sebagai Kaur Keuangan Desa atau bendahara desa di Desa Kulo, Kecamatan Kulo, Kabupaten Sidenreng Rappang.

"Kendala utama yang kami hadapi dalam pengelolaan dana desa di Desa Kulo adalah terbatasnya sumber daya manusia yang memahami secara mendalam tentang administrasi keuangan dan peraturan yang berlaku. Banyak warga desa yang kurang familiar dengan prosedur dan regulasi yang harus dipatuhi dalam pengelolaan dana desa. Untuk mengatasi hal ini, kami rutin mengadakan pelatihan dan bimbingan kepada aparat desa dan pengelola keuangan, baik secara internal maupun melalui pelatihan dari pihak luar seperti instansi pemerintah atau lembaga terkait. Selain itu, kami juga memanfaatkan teknologi untuk mempermudah pencatatan dan pengawasan agar pengelolaan dana lebih transparan dan akuntabel."⁵⁶

Berdasarkan pernyataan Bendahara Desa Kulo, kendala utama dalam pengelolaan dana desa adalah terbatasnya sumber daya manusia yang memiliki pemahaman mendalam tentang administrasi keuangan dan peraturan yang berlaku. Banyak warga desa yang belum sepenuhnya memahami prosedur dan regulasi yang harus dipatuhi dalam pengelolaan dana desa, yang berpotensi menyebabkan kesulitan dalam menjalankan tugas administrasi secara tepat.

Untuk mengatasi kendala tersebut, pemerintah desa rutin mengadakan pelatihan dan bimbingan kepada aparat desa dan pengelola keuangan. Pelatihan ini dilakukan baik secara internal maupun dengan melibatkan pihak luar, seperti instansi pemerintah atau lembaga terkait, untuk meningkatkan pemahaman dan keterampilan dalam mengelola dana desa. Langkah ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas sumber

⁵⁶ Erna, KAUR Keuangan Desa Kulo, *Wawancara*, (Kulo, 06 Desember 2024. Pukul 10.00).

daya manusia di tingkat desa dalam hal pengelolaan keuangan yang lebih baik.

Selain pelatihan, Bendahara Desa Kulo juga menekankan pentingnya pemanfaatan teknologi dalam mempermudah pencatatan dan pengawasan dana desa. Dengan dukungan teknologi, proses administrasi menjadi lebih efisien, serta meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dana desa. Penggunaan sistem digital ini juga memudahkan pengelola untuk memonitor anggaran dan memastikan bahwa pengeluaran tercatat dengan rapi dan akurat, sehingga pengelolaan dana desa di Desa Kulo dapat berjalan dengan lebih baik.

11. Pendapat Masyarakat Terhadap Program-Program Yang Dijalankan Desa

Program desa merujuk pada serangkaian inisiatif atau kegiatan yang dilaksanakan oleh pemerintah atau lembaga terkait untuk memajukan pembangunan di tingkat desa. Tujuan utama dari program-program ini adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, memperbaiki infrastruktur, meningkatkan akses terhadap layanan publik, serta memberdayakan masyarakat desa agar lebih mandiri dan produktif.

Uraian lebih jelas tentang pandangan pemerintah tentang program yang dijalankan desa di desa Kulo Kecamatan Kulo Kabupaten Sidrap, penulis menguraikan hasil wawancara dari beberapa responden sebagai sumber data yang akurat, dan pertanyaan di atas lebih dipertegas oleh informan atas nama Muhammad Darwis dan Azis Bustan, sebagai tokoh

masyarakat di Desa Kulo, Kecamatan Kulo, Kabupaten Sidenreng Rappang.

“Siddi bawang, maladde makkiguna. Akan tetapi ada juga yang program prioritas yang diutamakan sesuai arahan dari pusat itu juga tidak berguna.”⁵⁷

Bapak Mohammad Darwis mengemukakan persetujuannya atas program-program yang dijalankan oleh pemerintah desa, dengan menyatakan bahwa program-program tersebut sangat berguna bagi masyarakat. Dalam wawancaranya, beliau menyampaikan kalimat persetujuan yang diungkapkan dalam bahasa Bugis yang artinya "sangat berguna," yang menunjukkan bahwa beliau mengapresiasi keberhasilan program-program tersebut dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa Kulo. Namun, di sisi lain, Bapak Darwis juga menyoroti adanya beberapa arahan dari pemerintah pusat mengenai program prioritas yang menurutnya tidak memberikan manfaat yang signifikan bagi pemberdayaan masyarakat desa. Beliau merasa bahwa sebagian dari program yang diprioritaskan oleh pemerintah pusat justru kurang relevan dengan kondisi nyata di desa dan tidak dapat diimplementasikan dengan efektif untuk memenuhi kebutuhan masyarakat lokal. Sebagai contoh, meskipun ada sejumlah program yang diusulkan oleh pusat, menurut Bapak Darwis, program-program tersebut lebih bersifat top-down dan kurang mempertimbangkan kondisi spesifik

⁵⁷ Muhammad Darwis, Tokoh Masyarakat, *Wawancara* (Kaboe, 01 Januari 2025. Pukul 14.00).

serta potensi yang dimiliki oleh desa. Oleh karena itu, beliau mengusulkan agar pemerintah desa lebih fokus pada program-program yang berbasis pada potensi dan kebutuhan langsung dari masyarakat, serta meningkatkan komunikasi dengan pemerintah pusat untuk memastikan bahwa kebijakan yang diterapkan benar-benar sesuai dan berdampak positif bagi pemberdayaan masyarakat desa Kulo.

“Tepat sasaran dengan apa yang semestinya dibangun di Desa, artinya besar manfaatnya untuk sebagian besar masyarakat di Desa Kulo.”⁵⁸

Lain halnya dengan Bapak Azis, yang mengaku puas dengan pembangunan-pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah Desa Kulo. Menurutnya, program-program yang dijalankan oleh pemerintah desa sudah berjalan dengan baik dan tepat sasaran, memberikan manfaat nyata bagi masyarakat desa. Beliau merasa bahwa setiap proyek yang dilaksanakan memiliki dampak positif yang jelas, dan mencerminkan upaya nyata dalam meningkatkan kualitas hidup warga desa. Bapak Azis juga mengungkapkan keyakinannya bahwa program-program yang diprioritaskan oleh pemerintah pusat pasti memiliki kegunaan dan manfaat, meskipun terkadang ada kekhawatiran mengenai relevansi program tersebut. Menurutnya, hal ini dikarenakan sebelum pemerintah pusat menginstruksikan program-program pembangunan tertentu, semuanya diawali dengan usulan yang berasal dari pemerintah desa itu

⁵⁸Azis Bustan, Tokoh Masyarakat, *Wawancara* (Kaboe, 01 Januari 2025. Pukul 15.00).

sendiri. Dengan kata lain, setiap instruksi atau kebijakan dari pemerintah pusat sudah dipertimbangkan secara matang dan disesuaikan dengan kebutuhan desa yang telah diidentifikasi oleh pemerintah desa melalui musyawarah dengan masyarakat. Oleh karena itu, Bapak Azis berpendapat bahwa tidak mungkin ada program yang tidak berguna, karena setiap kebijakan yang ada telah melalui proses evaluasi dan persetujuan yang melibatkan pemangku kepentingan di tingkat desa. Menurut beliau, kerja sama yang baik antara pemerintah desa dan pemerintah pusat dalam merancang dan menjalankan program pembangunan adalah kunci untuk menciptakan pembangunan yang efektif dan bermanfaat bagi seluruh masyarakat.

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan dengan tokoh masyarakat di Desa Kulo, masyarakat menilai bahwa program-program yang dijalankan desa kebanyakan bermanfaat bagi sebagian besar masyarakat, namun tidak menutup kemungkinan bahwa ada beberapa program yang dinilai tidak perlu tetapi tetap dijalankan karena instruksi dari pusat.

12. Evaluasi Penatausahaan Dana Desa dan Kesesuaiannya dengan Prosedur yang Berlaku

Penatausahaan dana desa yang baik sangat bergantung pada kesesuaian dengan prosedur yang berlaku, serta kemampuan untuk mengelola dana secara transparan dan efisien. Pada sub bab ini, akan dibahas sejauh mana proses penatausahaan dana desa di Desa Kulo telah dijalankan sesuai dengan peraturan yang ada dan apakah pengelolaan

dana desa sudah memenuhi standar yang diharapkan. Evaluasi ini penting untuk memastikan bahwa dana yang dikelola dapat memberikan manfaat maksimal bagi pembangunan desa dan kesejahteraan masyarakat.

Uraian lebih jelas tentang pandangan pemerintah tentang program yang dijalankan desa di desa Kulo Kecamatan Kulo Kabupaten Sidrap, penulis menguraikan hasil wawancara dari beberapa responden sebagai sumber data yang akurat, dan pertanyaan di atas lebih dipertegas oleh informan atas nama Muhammad Darwis dan Azis Bustan, sebagai tokoh masyarakat di Desa Kulo, Kecamatan Kulo, Kabupaten Sidenreng Rappang.

“Saya rasa penatausahaan dana desa di Desa Kulo sudah sesuai dengan prosedur yang ada. Proses administrasi dan pelaporan sudah terorganisir dengan baik, dan kami sebagai warga desa selalu diberikan kesempatan untuk memantau setiap pengeluaran. Meskipun begitu, ada beberapa hal yang mungkin perlu diperbaiki, seperti peningkatan pemahaman warga tentang bagaimana dana desa dikelola, agar ke depan masyarakat bisa lebih aktif berpartisipasi dalam pengawasan dan memberikan masukan.”⁵⁹

Berdasarkan pernyataan Muhammad Darwis, tokoh masyarakat Desa Kulo, dapat disimpulkan bahwa penatausahaan dana desa di desa tersebut sudah dijalankan dengan baik dan sesuai dengan prosedur yang berlaku. Proses administrasi dan pelaporan dana desa terorganisir dengan baik, sehingga warga desa memiliki akses yang jelas untuk memantau setiap pengeluaran. Hal ini menunjukkan bahwa pengelolaan dana desa di Desa Kulo telah berjalan secara transparan dan akuntabel.

⁵⁹ Muhammad Darwis, Tokoh Masyarakat, *Wawancara* (Kaboe, 01 Januari 2025. Pukul 14.00).

Namun, meskipun sistem pengelolaan dana desa sudah berjalan dengan baik, Muhammad Darwis mengungkapkan bahwa masih ada beberapa aspek yang perlu diperbaiki, terutama dalam hal pemahaman masyarakat mengenai cara dana desa dikelola. Peningkatan pemahaman ini penting agar masyarakat dapat lebih aktif dalam pengawasan dan memberikan masukan yang konstruktif terhadap penggunaan dana desa. Dengan pemahaman yang lebih baik, diharapkan masyarakat bisa berperan lebih aktif dalam memastikan penggunaan dana desa benar-benar sesuai dengan kebutuhan dan prioritas pembangunan desa.

Secara keseluruhan, pernyataan Muhammad Darwis mencerminkan bahwa meskipun penatausahaan dana desa sudah sesuai prosedur, masih ada ruang untuk perbaikan dalam hal keterlibatan masyarakat. Meningkatkan pemahaman warga mengenai pengelolaan dana desa menjadi langkah penting agar pengawasan dan partisipasi masyarakat dalam proses tersebut dapat semakin maksimal.

Selanjutnya, wawancara dengan tokoh masyarakat kedua akan membahas juga tentang evaluasi terhadap penatausahaan dana desa di Desa Kulo serta sejauh mana kesesuaiannya dengan prosedur yang berlaku.

"Sebagai warga, saya merasa penatausahaan dana desa di Desa Kulo sudah cukup baik. Setiap tahapan penggunaan dana selalu dilaporkan secara terbuka dalam forum-forum desa, dan kami dapat melihat secara langsung bagaimana dana tersebut digunakan. Saya juga merasa ada peningkatan dalam hal transparansi, terutama dengan adanya penggunaan teknologi dalam pelaporan keuangan. Tentunya, kami berharap ke depan,

pengelolaan dana desa ini semakin efisien dan semakin banyak melibatkan partisipasi masyarakat."⁶⁰

Berdasarkan pernyataan Azis Bustan, tokoh masyarakat Desa Kulo, dapat disimpulkan bahwa penatausahaan dana desa di Desa Kulo sudah dilaksanakan dengan cukup baik. Setiap tahapan penggunaan dana desa dilaporkan secara terbuka dalam forum-forum desa, yang memberi kesempatan kepada masyarakat untuk memantau dan mengetahui secara langsung bagaimana dana desa digunakan. Hal ini menunjukkan adanya upaya untuk menjaga transparansi dan keterbukaan dalam pengelolaan dana desa.

Azis Bustan juga menyoroti peningkatan transparansi yang terlihat dengan adanya penggunaan teknologi dalam pelaporan keuangan. Pemanfaatan teknologi ini tidak hanya mempermudah proses pelaporan, tetapi juga memungkinkan masyarakat untuk mengakses informasi keuangan dengan lebih cepat dan efisien. Dengan adanya inovasi ini, pengelolaan dana desa menjadi lebih akuntabel dan dapat dipertanggungjawabkan dengan baik kepada warga desa.

Namun, meskipun penatausahaan dana desa sudah berjalan dengan baik, Azis Bustan berharap ke depannya pengelolaan dana desa akan semakin efisien. Selain itu, ia juga berharap agar partisipasi masyarakat dalam pengelolaan dana desa dapat lebih ditingkatkan.

⁶⁰Azis Bustan, Tokoh Masyarakat, *Wawancara* (Kaboe, 01 Januari 2025. Pukul 15.00).

Partisipasi yang lebih besar dari masyarakat diharapkan dapat memperkuat pengawasan serta memastikan bahwa dana desa digunakan secara optimal untuk kepentingan bersama, sehingga memberikan dampak yang lebih besar bagi kemajuan desa.

13. Fokus Pengelolaan Dana Desa Antara Instruksi Pemerintah dan Kebutuhan Masyarakat

Fokus pengelolaan dana desa mengacu pada cara-cara dan prioritas yang diterapkan oleh pemerintah desa dalam menggunakan dana yang diterima dari pemerintah pusat atau daerah untuk pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa. Dana desa ini merupakan alokasi anggaran dari pemerintah pusat yang diberikan kepada desa untuk mendanai berbagai kegiatan yang mendukung pembangunan infrastruktur, peningkatan kesejahteraan, dan pemberdayaan masyarakat desa.

Uraian lebih jelas tentang fokus pemerintah tentang pengelolaan dana desa di desa Kulo Kecamatan Kulo Kabupaten Sidrap, penulis menguraikan hasil wawancara dari beberapa responden sebagai sumber data yang akurat, dan pertanyaan di atas lebih dipertegas oleh informan atas nama Muhammad Darwis dan Azis Bustan, sebagai tokoh masyarakat di Desa Kulo, Kecamatan Kulo, Kabupaten Sidenreng Rappang.

“Menurutku itu lebih banyak ke kebutuhan masyarakat, karena sesuai ji sama apa yang diharapkan”⁶¹

⁶¹ Muhammad Darwis, Tokoh Masyarakat, *Wawancara* (Kaboe, 01 Januari 2025. Pukul 14.00).

Responden pertama, Bapak Muhammad Darwis, menyatakan bahwa dalam pengelolaan dana desa di Desa Kulo, prioritas utama adalah memenuhi kebutuhan masyarakat terlebih dahulu, meskipun ada instruksi dari pemerintah pusat yang harus diikuti. Menurut beliau, pemerintah desa berkomitmen untuk memastikan bahwa alokasi dana desa benar-benar dapat memberi dampak positif langsung kepada warga desa, dengan fokus utama pada kesejahteraan mereka. Beliau juga menegaskan bahwa anggaran yang diterima dari pemerintah pusat tidak hanya digunakan untuk memenuhi program-program prioritas yang ditetapkan oleh pemerintah, tetapi pemerintah desa juga menunjukkan kebijakan yang sangat bijak dalam pengelolaannya. Dalam hal ini, anggaran tersebut digunakan dengan sangat hati-hati dan penuh pertimbangan, untuk memastikan bahwa setiap dana yang ada benar-benar dimanfaatkan untuk kebutuhan mendesak dan pembangunan yang lebih berkelanjutan, yang pada akhirnya dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat desa. Keputusan-keputusan ini tidak hanya memperhatikan regulasi yang ada, tetapi juga berfokus pada prinsip-prinsip keberpihakan kepada masyarakat sebagai langkah untuk menciptakan kesejahteraan yang merata.

“Mungkin prioritas desa itu lebih terfokus pada instruksi pemerintah dulu, nanti ada sisa anggaran baru digunakan untuk kebutuhan masyarakat yang lain, tapi bukan berarti program yang diusulkan pemerintah pusat tidak bermanfaat, akan tetapi ada

beberapa kebutuhan masyarakat yang tidak masuk pengusulan, lebih tepatnya kebutuhan mendesak.”⁶²

Sedangkan responden kedua, Bapak Azis, memberikan pandangan yang berbeda mengenai pengelolaan anggaran di Desa Kulo. Beliau menyatakan bahwa, pada kenyataannya, fokus utama dalam pengelolaan dana desa adalah mengikuti program-program yang diusulkan oleh pemerintah pusat, meskipun pemerintah desa tetap berusaha untuk mempertimbangkan kebutuhan masyarakat. Menurut beliau, meskipun ada kebijakan dari pemerintah pusat yang menjadi acuan, pemerintah desa secara aktif berinisiatif dalam merancang dan menjalankan program-program yang dirasa tepat untuk memenuhi kebutuhan warga. Bapak Azis menambahkan bahwa pemerintah desa memiliki kepekaan yang tinggi terhadap aspirasi dan permasalahan masyarakat. Dalam hal ini, meskipun kebijakan pemerintah pusat tetap menjadi acuan, pemerintah desa sangat pandai dalam mengelola anggaran untuk memastikan bahwa program-program yang dihasilkan benar-benar memberikan dampak positif bagi kesejahteraan masyarakat. Dengan pengelolaan yang cermat dan fokus pada pemenuhan kebutuhan desa, pemerintah desa mampu menyusun program-program yang tidak hanya mengikuti pedoman dari pusat, tetapi juga mencerminkan kearifan lokal dalam rangka mendorong pembangunan yang sesuai dengan kondisi masyarakat Desa Kulo.

⁶²Azis Bustan, Tokoh Masyarakat, *Wawancara* (Kaboe, 01 Januari 2025. Pukul 15.00).

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan dengan tokoh masyarakat di Desa Kulo, masyarakat merasa bahwa pengelolaan dana desa yang difokuskan yaitu instruksi pemerintah, akan tetapi tidak mengesampingkan kebutuhan masyarakat.

14. Akuntabilitas dan Transparansi Laporan Penggunaan Dana Desa

Laporan penggunaan dana desa yang akuntabel dan transparan sangat penting untuk memastikan dana digunakan sesuai tujuan dan dapat dipertanggungjawabkan. Sub bab ini akan membahas sejauh mana laporan penggunaan dana desa di Desa Kulo mencerminkan akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaannya.

Uraian lebih jelas tentang fokus pemerintah tentang akuntabilitas dan transparansi laporan penggunaan dana desa di desa Kulo Kecamatan Kulo Kabupaten Sidrap, penulis menguraikan hasil wawancara dari beberapa responden sebagai sumber data yang akurat, dan pertanyaan di atas lebih dipertegas oleh informan atas nama Muhammad Darwis dan Azis Bustan, sebagai tokoh masyarakat di Desa Kulo, Kecamatan Kulo, Kabupaten Sidenreng Rappang.

"Ya, saya merasa laporan dana desa yang disampaikan cukup mencerminkan penggunaan dana yang akuntabel dan transparan. Setiap pengeluaran dijelaskan dengan rinci dan selalu ada bukti-bukti yang jelas seperti kwitansi atau faktur yang bisa diperiksa. Selain itu, laporan keuangan juga dipajang di papan pengumuman desa sehingga masyarakat dapat mengaksesnya kapan saja. Meskipun demikian, saya berharap ada penjelasan yang lebih

sederhana dan mudah dipahami bagi warga yang mungkin tidak terlalu mengerti soal administrasi keuangan."⁶³

Bapak Muhammad Darwis menyatakan bahwa laporan penggunaan dana desa di Desa Kulo sudah mencerminkan akuntabilitas dan transparansi yang baik. Setiap pengeluaran dijelaskan secara rinci dengan bukti-bukti yang jelas, seperti kwitansi atau faktur yang dapat diperiksa. Selain itu, laporan keuangan juga dipajang di papan pengumuman desa, memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk mengakses informasi tersebut kapan saja. Hal ini menunjukkan adanya upaya untuk menjaga transparansi dan keterbukaan dalam pengelolaan dana desa.

Namun, Bapak Muhammad Darwis juga mengemukakan harapan agar penjelasan dalam laporan dapat disederhanakan, sehingga lebih mudah dipahami oleh warga yang mungkin kurang familiar dengan administrasi keuangan. Penyederhanaan ini akan mempermudah masyarakat untuk memahami penggunaan dana desa secara lebih jelas, serta dapat meningkatkan partisipasi mereka dalam pengawasan dana desa.

Selanjutnya, wawancara dengan tokoh masyarakat kedua akan membahas juga tentang akuntabilitas dan transparansi laporan penggunaan dana di Desa Kulo serta sejauh mana kesesuaiannya dengan prosedur yang berlaku.

⁶³Muhammad Darwis, Tokoh Masyarakat, *Wawancara* (Kaboe, 01 Januari 2025. Pukul 14.00).

"Secara keseluruhan, saya rasa laporan dana desa sudah cukup transparan dan mencerminkan penggunaan dana yang akuntabel. Setiap laporan selalu dibahas dalam rapat desa dan bisa diakses oleh warga. Namun, saya berharap ada peningkatan dalam komunikasi antara pemerintah desa dan masyarakat, agar informasi yang disampaikan lebih lengkap dan tidak ada kesalahpahaman. Kadang-kadang, meskipun laporan sudah dipajang, warga tidak terlalu memperhatikan, jadi lebih banyak sosialisasi tentang pentingnya transparansi juga perlu dilakukan."⁶⁴

Bapak Azis Bustan juga merasa bahwa laporan penggunaan dana desa sudah cukup transparan dan mencerminkan akuntabilitas yang baik. Laporan selalu dibahas dalam rapat desa, dan masyarakat dapat mengakses laporan tersebut dengan mudah. Meskipun demikian, Bapak Azis Bustan menekankan pentingnya peningkatan komunikasi antara pemerintah desa dan masyarakat. Hal ini bertujuan agar informasi yang disampaikan lebih lengkap dan tidak ada kesalahpahaman antara pihak-pihak yang terlibat.

Meskipun laporan sudah dipajang, Bapak Azis Bustan mencatat bahwa terkadang warga kurang memperhatikan informasi yang ada. Oleh karena itu, ia mengusulkan agar lebih banyak sosialisasi tentang pentingnya transparansi dilakukan agar masyarakat lebih sadar akan peran mereka dalam mengawasi penggunaan dana desa. Sosialisasi yang lebih intensif dapat memperkuat partisipasi masyarakat dalam menjaga pengelolaan dana desa yang lebih baik dan efisien.

⁶⁴ Azis Bustan, Tokoh Masyarakat, *Wawancara* (Kaboe, 01 Januari 2025. Pukul 15.00).

15. Harapan Masyarakat Terhadap Efektivitas Dana Desa dalam Memenuhi Kebutuhan Lokal

Harapan efektivitas dana desa merujuk pada tujuan agar dana yang dialokasikan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah desa dapat digunakan secara optimal dan memberikan dampak positif yang nyata bagi pembangunan dan kesejahteraan masyarakat desa. Efektivitas dana desa mengacu pada sejauh mana dana tersebut dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan, seperti peningkatan infrastruktur, pemberdayaan ekonomi, peningkatan kualitas hidup, dan pengentasan kemiskinan di desa.

Uraian lebih jelas tentang harapan masyarakat tentang efektifitas pengelolaan dana desa di desa Kulo Kecamatan Kulo Kabupaten Sidrap, penulis menguraikan hasil wawancara dari beberapa responden sebagai sumber data yang akurat, dan pertanyaan di atas lebih dipertegas oleh informan atas nama Muhammad Darwis dan Azis Bustan, sebagai tokoh masyarakat di Desa Kulo, Kecamatan Kulo, Kabupaten Sidenreng Rappang.

“Kami sebagai masyarakat berharap kiranya anggaran dari pusat ditambah sambil kami mengupayakan juga ukm-ukm di desa ini dijalankan.”⁶⁵

Sebagai masyarakat Desa Kulo, beliau berharap agar alokasi anggaran yang diterima dari pemerintah pusat dapat ditingkatkan untuk

⁶⁵Muhammad Darwis, Tokoh Masyarakat, *Wawancara* (Kaboe, 01 Januari 2025. Pukul 14.00).

mendukung program-program yang lebih luas dan menyentuh berbagai kebutuhan desa. Harapan ini muncul seiring dengan upaya mereka untuk mendorong pengembangan sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di desa, yang diharapkan dapat memberikan dampak positif terhadap perekonomian lokal. Masyarakat merasa bahwa dengan adanya tambahan dana dari pusat, mereka dapat memperkuat program-program pemberdayaan ekonomi yang sudah ada, serta menciptakan peluang baru bagi masyarakat untuk berkembang secara mandiri. Sementara itu, masyarakat juga berupaya aktif untuk menjalankan dan mengembangkan UMKM di desa sebagai salah satu langkah untuk meningkatkan kesejahteraan, membuka lapangan kerja, dan mengurangi ketergantungan pada dana luar. Oleh karena itu, sinergi antara peningkatan anggaran dari pemerintah pusat dan upaya masyarakat dalam mengembangkan potensi ekonomi desa menjadi kunci untuk mencapai kemajuan yang lebih berkelanjutan dan merata di Desa Kulo.

“Saya berharap penganggaran di desa Kulo dapat dikelola dengan baik dan semoga program-program yang dijalankan berkesinambungan, dan lebih efektif juga tentunya.”⁶⁶

Harapan yang disampaikan oleh salah satu warga Desa Kulo mencerminkan keinginan agar pengelolaan anggaran desa dapat dilakukan dengan lebih baik, efisien, dan transparan. Masyarakat menginginkan agar dana desa yang diterima dapat digunakan secara

⁶⁶Azis Bustan, Tokoh Masyarakat, *Wawancara* (Kaboe, 01 Januari 2025. Pukul 15.00).

optimal untuk mendukung berbagai program pembangunan yang memberikan manfaat jangka panjang bagi kesejahteraan bersama. Selain itu, mereka berharap agar program-program yang dijalankan di desa tidak hanya bersifat sementara, tetapi dapat berkesinambungan dan terus berkembang seiring waktu. Dengan demikian, setiap inisiatif dan kebijakan yang dilaksanakan dapat memberikan dampak yang lebih besar, lebih efektif, dan lebih terarah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Keberhasilan pengelolaan anggaran yang baik ini tentunya akan sangat bergantung pada kolaborasi antara pemerintah desa, masyarakat, dan berbagai pihak terkait, sehingga tercapai tujuan pembangunan yang berkelanjutan dan memajukan Desa Kulo secara menyeluruh.

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan dengan tokoh masyarakat di Desa Kulo, masyarakat berharap dana desa ada penambahan jumlah dan berharap juga agar masyarakat dapat bekerja sama dalam membangun desa yang mandiri dengan memfungsikan ukm-ukm sebagai pendapatan asli desa. Masyarakat juga berharap agar program-program yang dijalankan berkesinambungan dan lebih efektif dampak positifnya terhadap masyarakat agar dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Desa Kulo.

B. PEMBAHASAN

1. Sistem Pengelolaan Dana dan *Flypaper Effect* Pada Program-Program di Desa Kulo.

Sistem Pengelolaan Dana di Desa Kulo memainkan peranan penting dalam keberhasilan pembangunan yang dijalankan oleh pemerintah desa. Dana desa yang disalurkan dari pemerintah pusat bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, memajukan infrastruktur desa, dan mengembangkan potensi lokal. Namun, dalam pelaksanaannya, sistem pengelolaan dana desa di Desa Kulo menghadapi berbagai tantangan. Salah satu tantangan utama adalah minimnya keterlibatan masyarakat dalam perencanaan dan pengawasan penggunaan dana tersebut. Keterlibatan masyarakat yang rendah dapat menyebabkan dana yang disalurkan tidak sepenuhnya digunakan sesuai dengan kebutuhan nyata masyarakat desa, dan lebih terfokus pada kegiatan yang tidak relevan atau kurang prioritas.

Fenomena *Flypaper Effect* dapat terlihat dalam pengelolaan dana desa di Desa Kulo, di mana peningkatan transfer dana dari pemerintah pusat tidak diimbangi dengan peningkatan kemampuan pengelolaan yang efektif oleh pemerintah desa. *Flypaper Effect* menggambarkan situasi di mana dana yang diterima daerah (atau desa) justru menyebabkan peningkatan belanja yang lebih besar tanpa adanya peningkatan pendapatan yang sebanding. Hal ini terjadi karena adanya ketergantungan pada dana transfer dari pemerintah pusat, sementara desa tidak mengoptimalkan potensi lokal atau pendapatan asli desa yang bisa mendukung keberlanjutan pembangunan.

Dalam konteks Desa Kulo, fenomena *Flypaper Effect* memperlihatkan adanya ketidaksesuaian antara alokasi dana yang

diterima dan hasil pembangunan yang tercapai. Pemerintah desa lebih fokus pada penggunaan dana yang datang dari pemerintah pusat tanpa memperhitungkan aspek pengelolaan yang berbasis pada kemandirian ekonomi desa. Oleh karena itu, meskipun dana yang cukup besar telah diterima, namun masih terdapat ketidakseimbangan antara peningkatan belanja dan pendapatan desa, serta kurangnya transparansi dalam pengelolaan dana tersebut. Hal ini berisiko memperburuk ketergantungan terhadap aliran dana luar, yang seharusnya digunakan untuk mendorong kemandirian ekonomi desa.

Penting bagi Desa Kulo untuk mengimplementasikan sistem pengelolaan dana yang lebih baik dan transparan agar tidak terjebak dalam siklus *Flypaper Effect*. Salah satu solusi yang bisa dilakukan adalah dengan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan dan pengawasan penggunaan dana. Dengan melibatkan masyarakat, diharapkan penggunaan dana desa dapat lebih tepat sasaran dan sesuai dengan kebutuhan lokal, serta mendorong keberlanjutan pembangunan yang tidak bergantung pada transfer dana dari pemerintah pusat. Selain itu, penguatan kapasitas pemerintah desa dalam hal manajerial dan pengelolaan keuangan juga akan sangat mendukung terciptanya pengelolaan dana desa yang lebih efisien dan efektif.

2. Faktor-Faktor yang meningkatkan dan mengurangi *Flypaper Effect* dalam Pengelolaan Dana Desa di Desa Kulo.

- a. Faktor-Faktor yang Meningkatkan *Flypaper Effect* dalam Pengelolaan Dana Desa di Desa Kulo.

Beberapa faktor dapat memperburuk dampak dari *Flypaper Effect* dalam pengelolaan dana desa di Desa Kulo. Salah satunya adalah minimnya potensi pendapatan asli desa. Desa Kulo memiliki keterbatasan dalam mengembangkan sumber daya alam atau objek wisata yang dapat diolah menjadi sumber pendapatan daerah. Hal ini membuat desa sangat bergantung pada transfer dana dari pemerintah pusat untuk membiayai berbagai program pembangunan. Ketergantungan ini dapat memperparah fenomena *Flypaper Effect* karena pemerintah desa cenderung lebih fokus pada pemanfaatan dana transfer tanpa mengembangkan alternatif sumber pendapatan yang lebih mandiri. Sebagai akibatnya, dana yang diterima justru digunakan untuk pembelanjaan yang tidak selalu sesuai dengan kebutuhan jangka panjang desa.

Faktor lain yang turut meningkatkan *Flypaper Effect* adalah kurangnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa. Ketika informasi mengenai penggunaan dana desa tidak disampaikan dengan jelas kepada masyarakat, mereka tidak dapat memantau atau mengawasi dengan efektif. Tanpa pengawasan yang memadai, dana desa seringkali digunakan untuk proyek-proyek yang tidak memberikan dampak signifikan bagi kesejahteraan masyarakat. Selain itu, ketidakjelasan alokasi anggaran dapat menyebabkan pemborosan dan ketidakefisienan dalam penggunaan dana tersebut.

Dalam kondisi ini, *Flypaper Effect* semakin menguat karena anggaran yang diterima desa lebih banyak digunakan untuk pengeluaran yang kurang terkontrol daripada untuk pengembangan ekonomi lokal yang berkelanjutan.

b. Faktor-Faktor yang Mengurangi *Flypaper Effect* dalam Pengelolaan Dana Desa di Desa Kulo

Di sisi lain, ada beberapa faktor yang dapat mengurangi dampak dari *Flypaper Effect* dan mendorong pengelolaan dana desa yang lebih baik di Desa Kulo. Salah satu faktor utama adalah peningkatan partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan pengawasan dana desa. Ketika masyarakat terlibat aktif dalam proses perencanaan, mereka bisa memberikan masukan yang lebih tepat tentang prioritas pembangunan yang sesuai dengan kebutuhan nyata desa. Partisipasi masyarakat juga dapat meningkatkan akuntabilitas, karena adanya pengawasan langsung dari warga terhadap penggunaan dana desa. Dengan demikian, pengelolaan dana desa tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah desa, tetapi juga masyarakat secara keseluruhan.

Selain itu, pembinaan kapasitas sumber daya manusia di tingkat pemerintah desa sangat penting untuk mengurangi *Flypaper Effect*. Peningkatan keterampilan dan pengetahuan aparatur desa dalam mengelola anggaran dan sumber daya desa akan membantu menciptakan kebijakan yang lebih efisien dan tepat sasaran. Melalui

pelatihan pengelolaan keuangan yang baik, pemerintah desa dapat lebih bijak dalam merencanakan anggaran dan menggunakan dana yang diterima. Keahlian dalam perencanaan dan pengelolaan ini akan mendorong desa untuk lebih mandiri dalam membiayai program-program pembangunan tanpa terlalu bergantung pada dana transfer dari pemerintah pusat.

Transparansi dan sistem pengawasan yang lebih baik juga merupakan faktor penting yang dapat mengurangi *Flypaper Effect*. Dengan adanya sistem pelaporan yang jelas dan terbuka, masyarakat dapat mengakses informasi terkait penggunaan dana desa, yang akan memotivasi pemerintah desa untuk menggunakan dana tersebut secara lebih hati-hati dan bertanggung jawab. Penguatan sistem pengawasan, baik dari masyarakat maupun pihak eksternal seperti lembaga pengawas keuangan, dapat mengurangi potensi penyimpangan dalam pengelolaan dana desa. Ketika dana desa digunakan dengan bijaksana, dana yang diterima tidak hanya akan meningkatkan belanja desa, tetapi juga mendorong peningkatan pendapatan dan kemandirian ekonomi desa dalam jangka panjang.

Dengan adanya faktor-faktor tersebut, pengelolaan dana desa di Desa Kulo dapat beralih dari ketergantungan pada dana transfer menjadi sistem yang lebih mandiri dan berkelanjutan. Melalui kombinasi partisipasi masyarakat, peningkatan kapasitas pemerintah desa, serta transparansi dan pengawasan yang lebih ketat, *Flypaper*

Effect dapat diminimalisir, dan pembangunan desa dapat berjalan lebih efektif dan efisien.

3. Implikasi Kebijakan yang Direkomendasikan Untuk Efektifitas Dana Desa Berdasarkan Temuan *Flypaper Effect*.

Berdasarkan temuan *Flypaper Effect* dalam pengelolaan dana desa, ada beberapa kebijakan yang direkomendasikan untuk meningkatkan efektivitas penggunaan dana desa dan mengurangi ketergantungan yang berlebihan pada transfer dana dari pemerintah pusat. Salah satu kebijakan utama yang perlu diterapkan adalah peningkatan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa. Pemerintah desa harus lebih terbuka dalam menyampaikan perencanaan anggaran, alokasi dana, serta laporan penggunaan dana kepada masyarakat. Dengan adanya informasi yang jelas dan dapat diakses oleh publik, masyarakat dapat terlibat langsung dalam mengawasi penggunaan dana desa, sehingga mengurangi potensi penyimpangan dan meningkatkan efisiensi penggunaan dana tersebut.

Selain itu, penguatan partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan dan pengawasan menjadi kebijakan yang sangat penting. Agar dana desa benar-benar digunakan sesuai dengan kebutuhan dan prioritas masyarakat, masyarakat harus dilibatkan dalam setiap tahap perencanaan dan implementasi program. Hal ini dapat dilakukan melalui musyawarah desa yang melibatkan perwakilan dari berbagai elemen masyarakat, termasuk tokoh masyarakat, kelompok perempuan, dan kelompok rentan lainnya. Dengan partisipasi yang lebih luas, keputusan yang diambil akan lebih mencerminkan kebutuhan masyarakat secara keseluruhan, serta memperkecil kemungkinan penyalahgunaan dana atau penggunaan dana untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu.

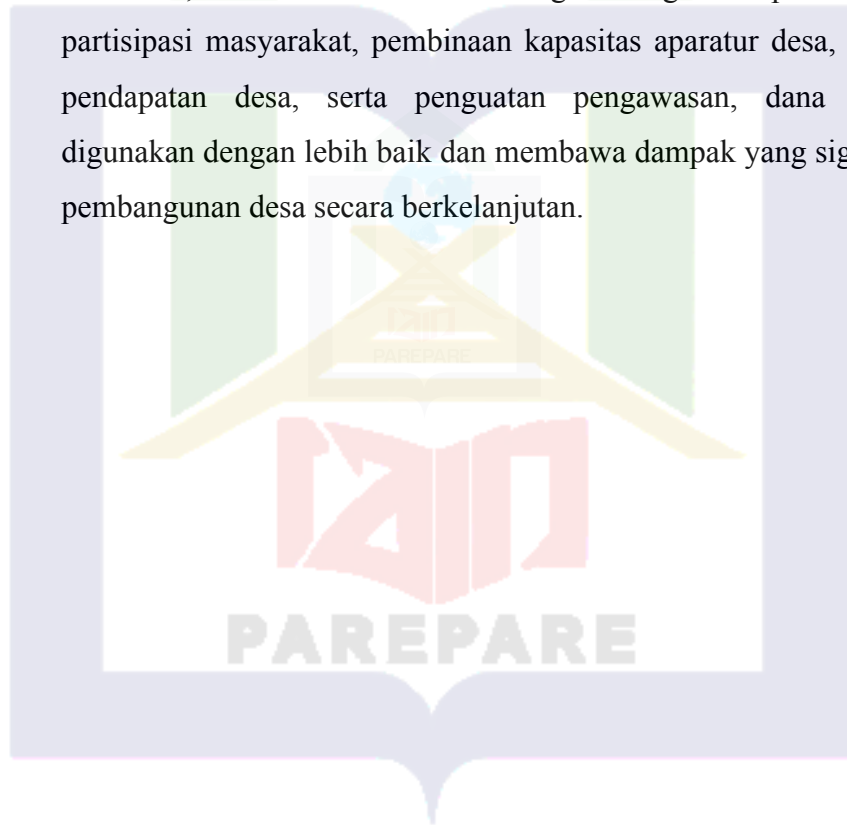
Rekomendasi lain adalah pembinaan kapasitas aparatur desa dalam hal pengelolaan keuangan dan perencanaan anggaran yang lebih profesional. Salah satu penyebab meningkatnya *Flypaper Effect* adalah ketidakmampuan pemerintah desa dalam merencanakan dan mengelola anggaran dengan efisien. Untuk itu, perlu adanya pelatihan dan pendampingan yang berkelanjutan bagi aparatur desa dalam hal pengelolaan dana desa, pembuatan anggaran, serta evaluasi kinerja. Dengan meningkatnya kapasitas sumber daya manusia di tingkat desa, pengelolaan dana desa akan lebih terarah, efektif, dan tidak hanya bergantung pada dana dari pemerintah pusat, tetapi juga mampu mengoptimalkan sumber daya lokal yang ada.

Diversifikasi Sumber Pendapatan Desa juga menjadi kebijakan penting untuk mengurangi dampak *Flypaper Effect*. Desa Kulo, seperti banyak desa lainnya, masih bergantung pada dana transfer dari pemerintah pusat untuk membiayai program pembangunan. Untuk mengurangi ketergantungan ini, desa perlu mencari sumber pendapatan lain, seperti mengembangkan potensi pariwisata lokal, meningkatkan hasil pertanian atau kerajinan tangan, serta mengembangkan usaha ekonomi desa yang melibatkan masyarakat secara langsung. Dengan adanya pendapatan asli desa yang lebih besar, desa akan memiliki kemandirian dalam pembiayaan pembangunan dan tidak terlalu bergantung pada aliran dana luar.

Kebijakan lainnya yang dapat direkomendasikan adalah penguatan sistem pengawasan oleh pihak eksternal, seperti badan pengawas keuangan atau lembaga swadaya masyarakat (LSM) yang fokus pada pengelolaan dana desa. Pengawasan yang lebih ketat dari pihak luar dapat membantu mendeteksi penyimpangan atau pemborosan sejak dini, serta memberikan masukan yang konstruktif dalam perbaikan

pengelolaan dana desa. Pengawasan yang efektif akan memastikan bahwa dana desa digunakan dengan efisien untuk tujuan yang telah ditetapkan, dan tidak hanya digunakan untuk meningkatkan belanja tanpa hasil yang jelas, seperti yang terjadi dalam fenomena *Flypaper Effect*.

Secara keseluruhan, kebijakan yang direkomendasikan untuk meningkatkan efektivitas dana desa adalah yang dapat mengurangi ketergantungan pada dana transfer dari pemerintah pusat dan memastikan penggunaan dana desa dilakukan dengan cara yang lebih transparan, akuntabel, dan efisien. Melalui langkah-langkah seperti peningkatan partisipasi masyarakat, pembinaan kapasitas aparatur desa, diversifikasi pendapatan desa, serta penguatan pengawasan, dana desa dapat digunakan dengan lebih baik dan membawa dampak yang signifikan bagi pembangunan desa secara berkelanjutan.



BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

1. Sistem Pengelolaan Dana dan *Flypaper Effect* Pada Program-Program di Desa Kulo.

Pengelolaan dana desa di Desa Kulo memiliki peran penting dalam pembangunan, namun masih menghadapi tantangan besar, seperti rendahnya keterlibatan masyarakat dan ketergantungan pada dana transfer dari pemerintah pusat. Fenomena *Flypaper Effect* menunjukkan adanya ketidakseimbangan antara peningkatan belanja desa dan kemandirian ekonomi desa itu sendiri. Untuk mengatasi hal ini, perlu ada peningkatan partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan pengawasan, serta penguatan kapasitas pemerintah desa dalam pengelolaan dana yang lebih transparan dan efisien. Dengan demikian, diharapkan pembangunan desa dapat lebih berkelanjutan dan tidak bergantung sepenuhnya pada dana luar.

2. Faktor-Faktor yang meningkatkan dan mengurangi *Flypaper Effect* dalam Pengelolaan Dana Desa di Desa Kulo.

Flypaper Effect dalam pengelolaan dana desa di Desa Kulo dipengaruhi oleh beberapa faktor yang memperburuk dampaknya, seperti ketergantungan pada transfer dana pemerintah pusat akibat terbatasnya potensi pendapatan asli desa, serta kurangnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa. Namun, faktor-faktor yang

dapat mengurangi dampak *Flypaper Effect* juga ada, seperti peningkatan partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan pengawasan, pembinaan kapasitas pemerintah desa, serta penguatan transparansi dan sistem pengawasan. Dengan mengoptimalkan faktor-faktor positif ini, Desa Kulo dapat mengurangi ketergantungan pada dana transfer dan beralih menuju sistem pengelolaan dana yang lebih mandiri dan berkelanjutan, yang akan mendorong pembangunan desa yang lebih efektif dan efisien.

3. Implikasi Kebijakan yang Direkomendasikan Untuk Efektifitas Dana Desa Berdasarkan Temuan *Flypaper Effect*.

Untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan dana desa dan mengurangi ketergantungan pada transfer dana dari pemerintah pusat, beberapa kebijakan perlu diterapkan. Kebijakan-kebijakan tersebut antara lain adalah peningkatan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa, penguatan partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan pengawasan, serta pembinaan kapasitas aparatur desa dalam pengelolaan keuangan dan perencanaan anggaran. Selain itu, diversifikasi sumber pendapatan desa dan penguatan sistem pengawasan eksternal juga penting untuk mengurangi ketergantungan pada dana luar dan memastikan penggunaan dana yang lebih efisien. Dengan kebijakan-kebijakan ini, pengelolaan dana desa diharapkan dapat lebih transparan, akuntabel, dan berkelanjutan, serta mendukung kemandirian ekonomi desa.

B. SARAN

Diharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi yang signifikan dalam upaya meningkatkan efektivitas pengelolaan dana desa di

Kecamatan Kulo, Kabupaten Sidrap. Penelitian ini diharapkan tidak hanya memberikan pemahaman mendalam tentang mekanisme pengelolaan dana desa yang ada saat ini, tetapi juga dapat memberikan wawasan serta rekomendasi kebijakan yang relevan untuk daerah lain di Indonesia. Dengan mengidentifikasi berbagai tantangan dan potensi dalam pengelolaan dana desa, penelitian ini bertujuan untuk memberikan solusi praktis yang dapat diterapkan di desa-desa lain, guna memperbaiki pengelolaan dana dan mencapai tujuan pembangunan yang lebih optimal. Lebih jauh lagi, dengan pengelolaan dana desa yang lebih baik dan efisien, diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa secara menyeluruh. Hal ini pada akhirnya dapat mendorong pembangunan desa yang berkelanjutan, dengan memperkuat perekonomian lokal, meningkatkan kualitas hidup, dan mempercepat proses pemerataan pembangunan di seluruh Indonesia.

C. KETERBATASAN PENELITIAN

Berikut yang menjadi keterbatasan penelitian Analisis *Flypaper Effect* pada Pengelolaan Dana Desa Kecamatan Kulo, Kabupaten Sidenreng Rappang:

1. Keterbatasan Data

Salah satu keterbatasan utama dalam penelitian ini adalah terbatasnya data yang tersedia mengenai alokasi dan penggunaan dana desa, terutama data yang bersifat detail dan lengkap. Banyak desa mungkin tidak memiliki dokumentasi yang cukup atau sistem pencatatan yang terorganisir dengan baik. Hal ini bisa menghambat pengumpulan data yang akurat mengenai pengaruh *Flypaper Effect* dalam pengelolaan dana desa.

2. Waktu Penelitian yang Terbatas

Penelitian ini hanya dilakukan dalam periode waktu yang terbatas, sehingga tidak dapat mencakup dinamika jangka panjang dalam pengelolaan dana desa. Pengaruh *Flypaper Effect* mungkin membutuhkan waktu yang lebih lama untuk terlihat secara signifikan, terutama dalam hal keberlanjutan program dan dampaknya terhadap perekonomian desa.

3. Fokus pada Satu Kecamatan

Penelitian ini terfokus hanya pada Kecamatan Kulo di Kabupaten Sidenreng Rappang, yang berarti hasilnya tidak dapat digeneralisasi untuk seluruh wilayah Indonesia. Karakteristik lokal seperti kondisi sosial, ekonomi, dan budaya di Kecamatan Kulo bisa berbeda dengan daerah lain, yang mempengaruhi temuan penelitian.

4. Subjektivitas dalam Wawancara

Sumber informasi dalam penelitian ini banyak bergantung pada wawancara dengan para pejabat pemerintah desa dan masyarakat setempat. Ada kemungkinan bahwa pandangan yang diungkapkan dalam wawancara bersifat subjektif, tergantung pada pengalaman pribadi dan perspektif individu yang diwawancarai. Ini bisa memengaruhi objektivitas dan validitas hasil penelitian.

5. Keterbatasan Sumber Daya

Penelitian ini dilakukan dengan sumber daya yang terbatas, baik dari segi dana maupun tenaga peneliti. Akibatnya, penelitian ini mungkin tidak bisa mengakses alat atau teknik analisis yang lebih canggih, seperti perangkat lunak analisis data yang lebih mahal atau pengambilan sampel yang lebih luas, yang bisa menghasilkan hasil yang lebih representatif.

6. Pengaruh Faktor Eksternal

Penelitian ini mungkin tidak dapat sepenuhnya mengisolasi pengaruh *Flypaper Effect* dari faktor-faktor eksternal lainnya yang memengaruhi pengelolaan dana desa, seperti kebijakan pemerintah pusat, perubahan sosial-ekonomi, atau faktor politik lokal. Faktor-faktor ini bisa mempengaruhi hasil yang didapatkan dan menambah kompleksitas dalam menganalisis pengaruh *Flypaper Effect*.

7. Pengaruh Keterbatasan Pemahaman *Flypaper Effect*

Sebagian besar responden yang diwawancarai mungkin tidak sepenuhnya memahami konsep *Flypaper Effect*, yang menyebabkan interpretasi mereka terhadap pengelolaan dana desa lebih bersifat generalisasi daripada analisis yang mendalam. Keterbatasan ini bisa memengaruhi ketepatan data yang dikumpulkan dan kualitas kesimpulan yang ditarik.

Dengan memahami keterbatasan-keterbatasan ini, penelitian selanjutnya dapat mengatasi dan memperbaiki aspek-aspek tersebut untuk menghasilkan temuan yang lebih komprehensif dan dapat diandalkan.

DAFTAR PUSTAKA

- Adian, Donny Gahral. *Pengantar Fenomenologi*. Penerbit Koekoesan, 2016.
- AFFIZA, SHEILA MARIA BELGIS PUTRI. *Analisis Pelaksanaan Rekrutmen, Seleksi, Dan Penempatan Tenaga Kerja Pada Bank Syariah Indonseia Kc Panorama Kota Bengkulu. Jurnal Rekrutmen*, 2022.
- Aminuddin Ilmar, S H. *Hukum Tata Pemerintahan*. Prenada Media, 2016.
- Arbi, Armawati. *Psikologi Komunikasi Dan Tabligh*. Penerbit AMZAH, 2012.
- Dr. Lia Dahlia Iryani, S.E.M.S., and M A Qisthi Wajanatin Alfafa. *Buku Ajar Akuntansi Syariah: Landasan Dan Implementasi Akad Murabahah, Musyarakah, Dan Mudharabah*. Uwais Inspirasi Indonesia, 2024.
<https://books.google.co.id/books?id=IUIGEQAAQBAJ>.
- Dzulhidayat. *Analisis Peran Gaya Kepemimpinan Dan Pelatihan Terhadap Motivasi Kerja Karyawan Pada Koperasi Unit Desa (KUD) Citra Sawit Mandiri Dalam Perspektif Islam. Skripsi*, 2022.
- Endraswara, Suwardi. "Metodologi Penelitian Fenomenologi Sastra," 2021.
- Fadhallah, R A. *Wawancara*. Unj Press, 2021.
- Fadli, Muhammad Rijal. "Memahami Desain Metode Penelitian Kualitatif." *HUMANIKA* 21, no. 1 (2021). <https://doi.org/10.21831/hum.v21i1.38075>.
- Farid, Muhammad, and M Sos. *Fenomenologi: Dalam Penelitian Ilmu Sosial*. Prenada Media, 2018.
- Gaffar, M Si, Muhammad Ichsan Gaffar, and M Ak SE. *Transparansi Keuangan Dan Peran Audit: Menghadapi Tantangan Era Digital*. Takaza Innovatix Labs, 2024.
- Gultom, Parlaungan. *Pendekatan Fenomenologis Terhadap Teori Penciptaan*. PBMR ANDI, 2021.
- Hafidhuddin, D, and B Handrianto. *Agar Layar Tetap Berkembang*. Gema Insani, 2006.
<https://books.google.co.id/books?id=rN7tbyHaO20C>.
- Halim, Rahmawati, S Sos, Muhlin Lalongan, and S Sos. *Partisipasi Politik Masyarakat: Teori Dan Praktik*. Vol. 1. SAH MEDIA, 2016.
- Haris, Syamsuddin. *Desentralisasi Dan Otonomi Daerah: Desentralisasi, Demokratisasi & Akuntabilitas Pemerintahan Daerah*. Yayasan Obor Indonesia, 2004.
- Hartati, Winda, and Taufeni Taufik. "Analisis Flypaper Effect Pada Belanja Desa Di Kabupaten Siak." *Current Jurnal Kajian Akuntansi Dan Bisnis Terkini* 1, no. 2 (2020).

- Jogiyanto Hartono, M. *Metoda Pengumpulan Dan Teknik Analisis Data*. Penerbit Andi, 2018.
- Kasnelly, Sri. "Teori Dan Praktek Akuntansi Syariah." *Al-A'mal: Jurnal Manajemen Bisnis Syariah* 1, no. 1 (2021): 21–32.
- Latifah, Eny, Rianto Rianto, R Neny Kusumadewi, Achmad Fauzi, Masyhuri Masyhuri, Stefani Lily Indarto, Iwan Wisandani, Fidiana Fidiana, Sri Mulyani, and Yovi Annang Setiyawan. "Dasar-Dasar Akuntansi Syariah," 2022.
- Managta, Hilmy Hafizh. "Analisis *Flypaper Effect* Belanja Daerah Dan Pengaruhnya Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Maluku Utara." *Jurnal Sosial Dan Sains* 3, no. 11 (2023): 1187–96.
- Mulyani, Hani Sri. "Analisis Fenomena Fly Paper Effect Dalam Belanja Desa Berdasarkan Pendapatan Asli Desa, Dana Desa Dan Alokasi Dana Desa." *J-AKSI: Jurnal Akuntansi Dan Sistem Informasi* 1, no. 1 (2020): 28–46.
- Munir Fuady, S.H.M.H.L.L.M. *Hukum Bisnis Dalam Teori Praktek Buku Kedua*. PT Citra Aditya Bakti, 2018. <https://books.google.co.id/books?id=kCuAEAAAQBAJ>.
- Musbikin, Imam. *Pendidikan Karakter Jujur*. Nusamedia, 2021.
- Ni'matuzahroh, SPMS, and Susanti Prasetyaningrum. *Observasi: Teori Dan Aplikasi Dalam Psikologi*. Vol. 1. UMMPress, 2018.
- Ningsih, Wahyu, Fefri Indra Arza, and Vita Fitria Sari. "Analisis Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa." *Jurnal Eksplorasi Akuntansi* 2, no. 4 (2020): 3517–32.
- Nurhadi, Zikri Fachrul. *Teori Komunikasi Kontemporer*. Prenada Media, 2017.
- Raharjo, Muhamad Mu'iz. *Pengelolaan Dana Desa*. Bumi Aksara, 2021.
- Riasnugrahani, M, and P Anallya. *Buku Ajar: Metode Penelitian Kualitatif*. Ideas Publishing, 2023. <https://books.google.co.id/books?id=Ku3bEAAAQBAJ>.
- Roisah, Kholis. "KEBIJAKAN HUKUM 'TRANSFERABILITY' TERHADAP PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL DI INDONESIA." *LAW REFORM* 11, no. 2 (2015). <https://doi.org/10.14710/lr.v11i2.15772>.
- Saputra, Andika. *CAMI: Aplikasi Uji Validitas Dan Reliabilitas Instrumen Penelitian Berbasis Web*. Yayasan ahmar cendekia indonesia, 2020.
- Srirejeki, Kiky. "Tata Kelola Keuangan Desa." *Jurnal Akuntansi Dan Bisnis* 15, no. 1 (2015): 33–37.
- Subakti, Hani, S.Pd., M.Pd, and MPH Prisusanti, Retno dewi, S.ST. *Riset Kualitatif Dan Kuantitatif Dalam Bidang Kesehatan*. Media Sains Indonesia, 2021.
- Sujarweni, V Wiratna. "Metodelogi Penelitian." *Yogyakarta: Pustaka Baru Perss*, 2014.

- Suyanto. *Peran Kepala Madrasah Dalam Meningkatkan Kinerja Gruu (Studi Kasus Di Madrasah Tsanawiyah Negeri Tumpang Kabupaten Malang)*. Tesis. Vol. 6, 2014.
- Taufik, Taufeni. “Pengelolaan Keuangan Desa Dalam Sistem Keuangan Negara Republik Indonesia.” *Jurnal Ekonomi Universitas Riau* 17, no. 01 (2009): 8754.
- Utami, Kharisma. *Analisis Penerapan Akuntansi Psak No.101 Pada Penyajian Laporan Keuangan Bank Bukopin Syari’Ah*. Utami, Kharisma, 2018.
- Wahid, Masykur. *Teori Interpretasi Paul Ricoeur*. LKIS PELANGI AKSARA, 2015.
- Yustisia, Tim Visi. *Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Dan Peraturan Terkait*. Visimedia, 2015.
- Zhang, Wenjuan, Menglin Xu, Yujuan Feng, Zhixiong Mao, and Zengyin Yan. “The Effect of Procrastination on Physical Exercise among College Students—The Chain Effect of Exercise Commitment and Action Control.” *International Journal of Mental Health Promotion* 26, no. 8 (2024): 611–22. <https://doi.org/10.32604/ijmhp.2024.052730>.



LAMPIRAN-LAMPIRAN





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Alamat : JL. Amal Bakti No. 8, Soreang, Kota Parepare 91132 ☎ (0421) 21307 📠 (0421) 24404
PO Box 909 Parepare 9110, website : www.ainpare.ac.id email: mail.ainpare.ac.id

Nomor : B-2161/In.39/FEBI.04/PP.00.9/06/2024

05 Juni 2024

Sifat : Biasa

Lampiran : -

H a l : Permohonan Izin Pelaksanaan Penelitian

Yth. BUPATI SIDENRENG RAPPANG

Cq. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
di

KAB. SIDENRENG RAPPANG

Assalamu Alaikum Wr. Wb.

Dengan ini disampaikan bahwa mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Parepare :

Nama	: SINTA DAHRI
Tempat/Tgl. Lahir	: TIPPULU KULO, 20 September 2002
NIM	: 2020203862202053
Fakultas / Program Studi	: Ekonomi dan Bisnis Islam / Akuntansi Syari`ah
Semester	: VIII (Delapan)
Alamat	: DESA KULO, KECAMATAN KULO, KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG

Bermaksud akan mengadakan penelitian di wilayah BUPATI SIDENRENG RAPPANG dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul :

ANALISIS FLYPAPER EFFECT PADA PENGELOLAAN DANA DESA KECAMATAN KULO KABUPATEN SIDRAP

Pelaksanaan penelitian ini direncanakan pada tanggal 05 Juni 2024 sampai dengan tanggal 19 Juli 2024.

Demikian permohonan ini disampaikan atas perkenaan dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Wassalamu Alaikum Wr. Wb.

Dekan,



Dr. Muzdalifah Muhammadun, M.Ag.
NIP 197102082001122002

Tembusan :

1. Rektor IAIN Parepare



PEMERINTAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
JL. HARAPAN BARU KOMPLEKS SKPD BLOK A NO. 5 KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG
PROVINSI SULAWESI SELATAN
Telepon (0421) - 3590005 Email : ptsp_sidrap@yahoo.co.id Kode Pos : 91611

IZIN PENELITIAN

Nomor : 256/IP/DPMPTSP/6/2024

- DASAR**
1. Peraturan Bupati Sidenreng Rappang No. 1 Tahun 2017 Tentang Pendelegasian Kewenangan di Bidang Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sidenreng Rappang
 2. Surat Permohonan **SINTA DAHRI** Tanggal **19-06-2024**
 3. Berita Acara Telaah Administrasi / Telaah Lapangan dari Tim Teknis **INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE** Nomor **B-2161/In.39/FEBI.04/PP.00.9/06/20** Tanggal **05-06-2024**

MENGIZINKAN

KEPADA
NAMA : SINTA DAHRI
ALAMAT : DSN KULO, DESA KULO, KEC. KULO
UNTUK : melaksanakan Penelitian dalam Kabupaten Sidenreng Rappang dengan keterangan sebagai berikut :
NAMA LEMBAGA / : INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE
UNIVERSITAS
JUDUL PENELITIAN : ANALISIS FLYPAPER EFFECT PADA PENGELOLAAN DANA DESA KECAMATAN KULO KABUPATEN SIDRAP

LOKASI PENELITIAN : DESA KULO, KECAMATAN KULO

JENIS PENELITIAN : KUALITATIF

LAMA PENELITIAN : 05 Juni 2024 s.d 19 Juli 2024

Izin Penelitian berlaku selama penelitian berlangsung

Dikeluarkan di : Pangkajene Sidenreng
Pada Tanggal : 19-06-2024



Biaya : Rp. 0,00

Tembusan :

1. DESA KULO, KECAMATAN KULO
2. DEKAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM IAIN PAREPARE



PEMERINTAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG
KECAMATAN KULO
DESA KULO

Alamat : Jl. Pangeran Diponegoro NO 17 Kode Pos 91653
E-mail: kantordesakulo99@gmail.com

SURAT KETERANGAN SELESAI PENELITIAN

Nomor : 02/DK/1/2025

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : HARYANTO

Jabatan : Kepala Desa Kulo

Menerangkan dengan sesungguhnya bahwa :

Nama : SINTA DAHRI

Alamat : Dsn Kulo Desa Kulo Kec. Kulo

Judul Penelitian : " Analisis Flypaper Effect Pada Pengelolaan Dana Desa
Kecamatan Kulo Kabupaten Sidrap "

Lokasi Penelitian : Desa Kulo Kecamatan Kulo

Lama Penelitian : 05 Juni 2024 s.d 24 Juli 2024

Bahwa yang bersangkutan tersebut diatas benar- benar Mahasiswa Institut
Agama Islam Negeri Parepare dan telah melaksanakan Penelitian di Desa Kulo
Kec.Kulo Kab. Sidrap selama 45 (Empat Puluh Lima) Hari.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat dan diberikan kepadanya untuk
dipergunakan seperlunya,-

Kulo, 06 Januari 2025
KEPALA DESA KULO



PAREPARE

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : HARYANTO
TTL : TIPPULU KULO, 2 Mei 1968
Pekerjaan : KEPALA DESA
Agama : ISLAM
Alamat : TIPPULU KULO

Menyatakan telah diwawancarai oleh:

Nama : Sinta Dahri
NIM : 2020203862202053
Jurusan : Akuntansi Syariah
Judul Penelitian : Analisis Flypaper Effect Pada Pengelolaan Dana
Desa Kecamatan Kulo Kabupaten Sidrap.
Alamat : Tippulu Kulo
Guguk Waktu : November/Desember

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sesungguhnya untuk
dipergunakan semestinya.

Kulo, 6 Desember 2024

Responden



SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : ERNA
TTL : KULO, 23/11/1986
Pekerjaan : RT / Kaur Keuangan Desa Kulo
Agama : ISLAM
Alamat : KAROE KULO

Menyatakan telah diwawancarai oleh:

Nama : Sinta Dahri
NIM : 2020203862202053
Jurusan : Akuntansi Syariah
Judul Penelitian : Analisis Flypaper Effect Pada Pengelolaan Dana
Desa Kecamatan Kulo Kabupaten Sidrap.
Alamat : Tippulu Kulo
Guguk Waktu : November/Desember

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sesungguhnya untuk
dipergunakan semestinya.

Kulo, 6 Desember 2024

Responden



SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : MUHAMMAD DARWIS
TTL : Tippulu, 14 Januari 1973
Pekerjaan : Petani
Agama : ISLAM
Alamat : Dusun Tippulu, Desa Kulo, ~~K~~

Menyatakan telah diwawancarai oleh:

Nama : Sinta Dahri
NIM : 2020203862202053
Jurusan : Akuntansi Syariah
Judul Penelitian : Analisis Flypaper Effect Pada Pengelolaan Dana
Desa Kecamatan Kulo Kabupaten Sidrap.
Alamat : Tippulu Kulo
Guguk Waktu : November/Desember

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sesungguhnya untuk
dipergunakan semestinya.

Kulo, 01 Januari 2025

Responden



MUHAMMAD DARWIS

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : AZIS BUSTAN
TTL : KULO, 04 November 1970
Pekerjaan : Petani
Agama : ISLAM
Alamat : Kaboe Desa Kulo

Menyatakan telah diwawancarai oleh:

Nama : Sinta Dahri
NIM : 2020203862202053
Jurusan : Akuntansi Syariah
Judul Penelitian : Analisis Flypaper Effect Pada Pengelolaan Dana
Desa Kecamatan Kulo Kabupaten Sidrap.
Alamat : Tippulu Kulo
Guguk Waktu : November/Desember

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sesungguhnya untuk
dipergunakan semestinya.

Kulo, 01 Januari 2025

Responden


AZIS BUSTAN

	KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM Jl. Amal Bakti No. 8 Soreang 91131 Telp. (0421) 21307
	VALIDASI INSTRUMEN PENELITIAN

NAMA : SINTA DAHRI

NIM : 2020203862202053

FAKULTAS : EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

PRODI : AKUNTANSI SYARIAH

JUDUL : ANALISIS *FLYPAPER EFFECT* BERDASARKAN
PENGOLAHAN DANA DESA DI DESA KULO
KECAMATAN KULO KABUPATEN SIDENRENG
RAPPANG

PEDOMAN WAWANCARA

A. WAWANCARA KEPALA DESA

1. Apakah pemerintah Desa Kulo mengerti yang dinamakan "*Flypaper Effect*" ?
2. Bagaimana proses perencanaan pengelolaan dana desa di Desa Kulo?

3. Apa saja yang menjadi pertimbangan utama dalam menentukan alokasi anggaran untuk berbagai program atau kegiatan di desa?
4. Bagaimana cara Anda memastikan bahwa dana desa dikelola dengan efisien dan efektif?
5. Bagaimana mekanisme pelaporan penggunaan dana desa di Desa Kulo?
6. Apakah Anda merasa ada tantangan atau kendala dalam hal pertanggungjawaban penggunaan dana desa kepada masyarakat?

B. WAWANCARA BENDAHARA DESA

1. Bagaimana proses pengelolaan keuangan dana desa dari penerimaan hingga pengeluarannya?
2. Sejauh mana penggunaan teknologi dalam membantu proses penatausahaan dana desa?
3. Apa kendala utama yang dihadapi dalam pengelolaan dana desa di Desa Kulo, dan bagaimana Anda mengatasinya?
4. Bagaimana mekanisme pertanggungjawaban terhadap penggunaan dana desa yang telah dikelola?

C. WAWANCARA MASYARAKAT

1. Apa pendapat anda tentang program-program yang dijalankan melalui dana desa?
2. Apakah Anda merasa penatausahaan dana desa sudah berjalan dengan baik dan sesuai prosedur yang berlaku?
3. Apakah menurut anda pengelolaan dana desa lebih banyak terfokus pada instruksi pemerintah atau kebutuhan masyarakat?

4. Apakah Anda merasa laporan dana desa yang disampaikan sudah mencerminkan penggunaan dana yang akuntabel dan transparan?
5. Sebagai masyarakat, apa yang anda harapkan agar dana desa bisa lebih efektif untuk memenuhi kebutuhan lokal?

Setelah mencermati instrumen dalam penelitian skripsi mahasiswa sesuadengan judul di atas, maka instrumen tersebut dipandang telah memenuhi kelayakan untuk digunakan dalam penelitian yang bersangkutan.

Parepare, 25 November 2024

Mengetahui,

Pembimbing utama

pembimbing pendamping



Dr. Zainal Said, M.H.
NIP: 19761118 200501 1 002

Dr. Andi Ayu Frihatni, S.E., M.Ak., CTA., ACPA
NIDN: 2003029203

DATA MENTAH WAWANCARA

TRANSKRIP WAWANCARA

A. WAWANCARA KEPALA DESA

1. Apakah pemerintah Desa Kulo mengerti yang dinamakan “*Flypaper Effect*”?

“Saya tidak tau yang dinamakan *Flypaper Effect*, maknanya saya tadi bertanya apa yang dimaksud, nah setelah didefinisikan ternyata saya paham ji, baiknya kalau anak-anak dari kampus itu penelitian begini ke desa-desa bagus jika tidak menggunakan istilah yang terlalu rumit.”_Haryanto

2. Bagaimana proses perencanaan pengelolaan dana desa di Desa Kulo?

“Proses perencanaan pengelolaan dana desa di Desa Kulo dimulai dengan musyawarah desa yang melibatkan perangkat desa, tokoh masyarakat, dan BPD untuk mendiskusikan prioritas pembangunan. Kami menyusun rencana anggaran yang mencakup program pembangunan infrastruktur dan pemberdayaan masyarakat, berdasarkan RPJMDes. Setiap tahunnya, perencanaan ini dievaluasi dan disesuaikan agar dana desa dapat digunakan secara efektif dan memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat.”_Haryanto

3. Apa saja yang menjadi pertimbangan utama dalam menentukan alokasi anggaran untuk berbagai program atau kegiatan di desa?

“Yang menjadi pertimbangan kami selaku aparat desa dalam menentukan alokasi anggaran itu kita lihat dlu apa yang kemudian menjadi kebutuhan di desa kita. Kalaupun semisalnya kami menetapkan anggaran untuk program desa, itu pasti kami pertimbangkan dampaknya pada desa.”_Haryanto

4. Bagaimana cara Anda memastikan bahwa dana desa dikelola dengan efisien dan efektif?

“Saya memastikan dana desa dikelola dengan transparan dan tepat sasaran melalui perencanaan yang matang dan melibatkan masyarakat. Setiap pengeluaran diawasi dengan ketat oleh aparat desa dan dilaporkan secara terbuka kepada warga. Kami juga rutin mengevaluasi penggunaan dana untuk memastikan bahwa dana tersebut digunakan secara efisien sesuai prioritas pembangunan yang telah disepakati bersama.”_Haryanto

5. Bagaimana cara Anda memastikan bahwa dana desa dikelola dengan efisien dan efektif?

“Di Desa Kulo, pelaporan penggunaan dana desa dilakukan secara terbuka dan transparan. Setiap tahapan penggunaan dana dilaporkan melalui rapat desa yang dihadiri oleh warga dan perangkat desa. Kami juga menyusun laporan tertulis yang mencakup rincian pengeluaran dan dipasang di papan pengumuman desa agar dapat diakses oleh semua masyarakat, seperti yang ada di depan sana. Selain itu, laporan tersebut juga disampaikan kepada Badan Permusyawaratan Desa (BPD) untuk mendapatkan evaluasi dan masukan. Dengan mekanisme ini, kami berharap dapat menjaga akuntabilitas dan mendorong partisipasi aktif dari masyarakat dalam pengawasan penggunaan dana desa.”_Haryanto

6. Apakah Anda merasa ada tantangan atau kendala dalam hal pertanggungjawaban penggunaan dana desa kepada masyarakat?

“Tentu saja, dalam menjalankan pertanggungjawaban penggunaan dana desa, kami menghadapi beberapa tantangan. Salah satunya adalah masih ada sebagian masyarakat yang belum sepenuhnya memahami rincian anggaran dan penggunaan dana desa, sehingga kadang muncul kebingungan atau ketidakpahaman. Untuk mengatasi ini, kami berupaya untuk lebih sering melakukan sosialisasi dan rapat desa, serta menyajikan laporan yang lebih mudah dipahami. Namun, kami selalu berkomitmen untuk menjaga transparansi dan akuntabilitas agar masyarakat bisa merasa tenang dan percaya terhadap pengelolaan dana desa.”_Haryanto

B. WAWANCARA BENDAHARA DESA

1. Bagaimana proses pengelolaan keuangan dana desa dari penerimaan hingga pengeluarannya?

“Samaji dengan pengelolaan dana desa pada umumnya, yakni perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, dan kemudian pertanggungjawaban.”_Erna

2. Sejauh mana penggunaan teknologi dalam membantu proses penatausahaan dana desa?

“Seiring dengan perkembangan teknologi, kami di Desa Kulo mulai memanfaatkan berbagai aplikasi dan sistem digital untuk mendukung penatausahaan dana desa. Kami menggunakan software akuntansi untuk mencatat semua transaksi secara otomatis, yang membantu mempercepat proses pencatatan dan meminimalkan kesalahan manusia. Selain itu, laporan keuangan juga dibuat dalam format digital, yang memudahkan untuk dibagikan kepada perangkat desa dan masyarakat. Teknologi ini juga memudahkan kami dalam memonitor anggaran dan memastikan bahwa semua pengeluaran tercatat dengan rapi dan transparan. Dengan dukungan teknologi, kami berharap pengelolaan dana desa bisa lebih efisien dan akuntabel.”_Erna

3. Apa kendala utama yang dihadapi dalam pengelolaan dana desa di Desa Kulo, dan bagaimana Anda mengatasinya?

"Kendala utama yang kami hadapi dalam pengelolaan dana desa di Desa Kulo adalah terbatasnya sumber daya manusia yang memahami secara mendalam tentang administrasi keuangan dan peraturan yang berlaku. Banyak warga desa yang kurang familiar dengan prosedur dan regulasi yang harus dipatuhi dalam pengelolaan dana desa. Untuk mengatasi hal ini, kami rutin mengadakan pelatihan dan bimbingan kepada aparat desa dan pengelola keuangan, baik secara internal maupun melalui pelatihan dari pihak luar seperti instansi pemerintah atau lembaga terkait. Selain itu, kami juga memanfaatkan teknologi untuk mempermudah pencatatan dan pengawasan agar pengelolaan dana lebih transparan dan akuntabel.”_Erna

4. Bagaimana mekanisme pertanggungjawaban terhadap penggunaan dana desa yang telah dikelola?

"Kendala utama yang kami hadapi dalam pengelolaan dana desa di Desa Kulo adalah terbatasnya sumber daya manusia yang memahami secara mendalam tentang administrasi keuangan dan peraturan yang berlaku. Banyak warga desa yang kurang familiar dengan prosedur dan regulasi yang harus dipatuhi dalam pengelolaan dana desa. Untuk mengatasi hal ini, kami rutin mengadakan pelatihan dan bimbingan kepada aparat desa dan pengelola keuangan, baik secara internal maupun melalui pelatihan dari pihak luar seperti instansi pemerintah atau lembaga terkait. Selain itu, kami juga memanfaatkan teknologi untuk mempermudah pencatatan dan pengawasan agar pengelolaan dana lebih transparan dan akuntabel." _Erna

C. WAWANCARA MASYARAKAT

1. Apa pendapat anda tentang program-program yang dijalankan melalui desa?

"Siddi bawang, maladde makkiguna. Akan tetapi ada juga yang program prioritas yang diutamakan sesuai arahan dari pusat itu juga tidak berguna." _Muhammad Darwis

"Tepat sasaran dengan apa yang semestinya dibangun di Desa, artinya besar manfaatnya untuk sebagian besar masyarakat di Desa Kulo." _Azis Bustan

2. Apakah Anda merasa penatausahaan dana desa sudah berjalan dengan baik dan sesuai prosedur yang berlaku?

"Saya rasa penatausahaan dana desa di Desa Kulo sudah sesuai dengan prosedur yang ada. Proses administrasi dan pelaporan sudah terorganisir dengan baik, dan kami sebagai warga desa selalu diberikan kesempatan untuk memantau setiap pengeluaran. Meskipun begitu, ada beberapa hal yang mungkin perlu diperbaiki, seperti peningkatan pemahaman warga tentang bagaimana dana desa dikelola, agar ke depan masyarakat bisa

lebih aktif berpartisipasi dalam pengawasan dan memberikan masukan.”_Muhammad Darwis

"Sebagai warga, saya merasa penatausahaan dana desa di Desa Kulo sudah cukup baik. Setiap tahapan penggunaan dana selalu dilaporkan secara terbuka dalam forum-forum desa, dan kami dapat melihat secara langsung bagaimana dana tersebut digunakan. Saya juga merasa ada peningkatan dalam hal transparansi, terutama dengan adanya penggunaan teknologi dalam pelaporan keuangan. Tentunya, kami berharap ke depan, pengelolaan dana desa ini semakin efisien dan semakin banyak melibatkan partisipasi masyarakat.”_Azis Bustan

3. Apakah menurut anda pengelolaan dana desa lebih banyak terfokus pada instruksi pemerintah atau kebutuhan masyarakat?

“Menurutku itu lebih banyak ke kebutuhan masyarakat, karena sesuai ji sama apa yang diharapkan.”_Muhammad Darwis

“Mungkin prioritas desa itu lebih terfokus pada instruksi pemerintah dulu, nanti ada sisa anggaran baru digunakan untuk kebutuhan masyarakat yang lain, tapi bukan berarti program yang diusulkan pemerintah pusat tidak bermanfaat, akan tetapi ada beberapa kebutuhan masyarakat yang tidak masuk pengusulan, lebih tepatnya kebutuhan mendesak.”_Azis Bustan

4. Apakah Anda merasa laporan dana desa yang disampaikan sudah mencerminkan penggunaan dana yang akuntabel dan transparan?

“Ya, saya merasa laporan dana desa yang disampaikan cukup mencerminkan penggunaan dana yang akuntabel dan transparan. Setiap pengeluaran dijelaskan dengan rinci dan selalu ada bukti-bukti yang jelas seperti kwitansi atau faktur yang bisa diperiksa. Selain itu, laporan keuangan juga dipajang di papan pengumuman desa sehingga masyarakat dapat mengaksesnya kapan saja. Meskipun demikian, saya berharap ada penjelasan yang lebih sederhana dan mudah dipahami bagi warga yang mungkin tidak terlalu mengerti soal administrasi keuangan.”_Muhammad Darwis

"Secara keseluruhan, saya rasa laporan dana desa sudah cukup transparan dan mencerminkan penggunaan dana yang akuntabel.

Setiap laporan selalu dibahas dalam rapat desa dan bisa diakses oleh warga. Namun, saya berharap ada peningkatan dalam komunikasi antara pemerintah desa dan masyarakat, agar informasi yang disampaikan lebih lengkap dan tidak ada kesalahpahaman. Kadang-kadang, meskipun laporan sudah dipajang, warga tidak terlalu memperhatikan, jadi lebih banyak sosialisasi tentang pentingnya transparansi juga perlu dilakukan.”_Azis Bustan

5. Sebagai masyarakat, apa yang anda harapkan agar dana desa bisa lebih efektif untuk memenuhi kebutuhan lokal?

“Kami sebagai masyarakat berharap kiranya anggaran dari pusat ditambah sambil kami mengupayakan juga ukm-ukm di desa ini dijalankan.”_Muhammad Darwis

“Saya berharap penganggaran di desa Kulo dapat dikelola dengan baik dan semoga program-program yang dijalankan berkesinambungan, dan lebih efektif juga tentunya.”_Azis Bustan

DOKUMENTASI WAWANCARA

Dokumentasi wawancara dengan Haryanto, Kepala Desa Kulo.



Dokumentasi wawancara dengan Erna, KAUR Keuangan Desa Kulo.



Dokumentasi wawancara dengan Muhammad Darwis, tokoh masyarakat Desa Kulo.



Dokumentasi wawancara dengan Azis Bustan, tokoh masyarakat Desa Kulo.



BIODATA PENULIS



Sinta Dahri, lahir pada tanggal 20 September 2002. Alamat di Dusun Kulo, Kecamatan Kulo, Kab. Sidrap. Anak pertama dari lima bersaudara. Ayah bernama Dahri Said dan Ibu bernama Sukayati. Adapun riwayat pendidikan penulis yaitu pada tahun 2008 menempuh pendidikan Sekolah Dasar di SD Negeri 8 Kulo, kemudian pada tahun 2014 melanjutkan pendidikan Sekolah Menengah Pertama di SMP Negeri 1 Panca Rijang. Pada tahun 2017 melanjutkan pendidikan di Sekolah Menengah Atas di SMA Negeri 1 Sidrap. Pendidikan S1 ditempuh di Institut Agama Islam Negeri Parepare, dengan mengambil jurusan Akuntansi Syariah pada Fakultas dan Bisnis Islam. Penulis menyelesaikan Skripsi dengan judul “*Analisis Flypaper Effect Pada Pengelolaan Dana Desa Kecamatan Kulo Kabupaten Sidenreng Rappang*”.